



PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU KELAS II



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2019



Jalan Tingang Menteng No.39, Pulang
Pisau 748111, Kab. Pulang Pisau,
Kalimantan Tengah
Telp. (0513) 2027516



www.pn-pulangpisau.go.id



pn-pulangpisau@gmail.com



PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU KELAS II



KATA PENGANTAR



Jalan Tingang Menteng No.39, Pulang
Pisau 748111, Kab. Pulang Pisau,
Kalimantan Tengah
Telp. (0513) 2027516



www.pn-pulangpisau.go.id



pnpulangpisau@gmail.com



KATA PENGANTAR

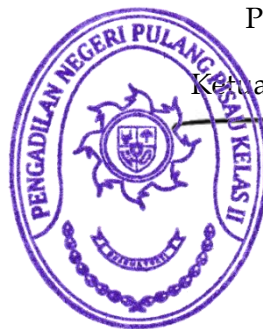
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Pengadilan Negeri Pulang Pisau Tahun 2019. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) ini adalah penyampaian hasil evaluasi terhadap Kinerja selama satu tahun anggaran 2019.

Laporan Tahunan ini kami susun berdasarkan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1604/SEK/OT.01.2/11/2019 tanggal 15 Nopember 2019 perihal Penyampaian Dokumen SAKIP.

Akhirnya kami mengucapkan terimakasih pada semua pihak yang telah membantu untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) tahun 2019 ini. Semoga dengan tersusunnya Laporan ini akan menjadi pedoman untuk perbaikan kinerja pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau.

Pulang Pisau, 27 Januari 2020

Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau,



AGUNG NUGROHO, S.H.

NIP. 19720307 200003 1 003



PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU KELAS II



DAFTAR ISI



Jalan Tingang Menteng No.39, Pulang
Pisau 748111, Kab. Pulang Pisau,
Kalimantan Tengah
Telp. (0513) 2027516



www.pn-pulangpisau.go.id



pnpulangpisau@gmail.com



DAFTAR ISI

| | |
|-------------------------------------|-----|
| KATA PENGANTAR..... | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| RINGKASAN EKSEKUTIF | iii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi..... | 2 |
| C. Sistematika Penyajian | 3 |
| BAB II PERENCANAAN KINERJA | 5 |
| Rencana Kinerja Tahun 2019..... | 5 |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA..... | 10 |
| A. Capaian Kinerja Organisasi..... | 10 |
| B. Realisasi Anggaran..... | 56 |
| BAB IV PENUTUP | 59 |
| A. Kesimpulan..... | 59 |
| B. Saran..... | 60 |
| LAMPIRAN | |



PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU KELAS II



RINGKASAN EKSEKUTIF



Jalan Tingang Menteng No.39, Pulang
Pisau 748111, Kab. Pulang Pisau,
Kalimantan Tengah
Telp. (0513) 2027516



www.pn-pulangpisau.go.id



pnpulangpisau@gmail.com



RINGKASAN EKSEKUTIF

Pengadilan Negeri Pulang Pisau sebagai salah satu Badan Pelaksana Kekuasaan Kehakiman dan sebagai *voorpost* Mahkamah Agung RI bertugas menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama baik perkara pidana maupun perdata, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum beserta Penjelasannya yang meliputi penyelesaian sengketa pidana dan perdata.

Seluruh program kerja Pengadilan Negeri Pulang Pisau didasarkan pada tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja dengan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya serta Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Pulang Pisau Tahun 2015-2019 secara konsisiten, terus menerus dan berkesinambungan.

Secara keseluruhan, tingkat pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Pangkalan Bun adalah sebesar 100,37%.

Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut:

| Sasaran Strategis I : | | | | |
|--|--|--------|-----------|------------|
| Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel | | | | |
| NO | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | PERSENTASE |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan | 100% | 100% | 100% |
| | Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan | 100% | 100% | 100% |
| | Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat | 95% | 82,35% | 86,68% |

| | | | |
|---|-----|---------|----------|
| Waktu | | | |
| Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu | 95% | 99,3% | 104,53 % |
| Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding | 70% | 93,33 % | 103,33 % |
| Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi | 80% | 98,11 % | 122,64 % |
| Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali | 90% | 100% | 111,11% |
| Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi | 2% | 0% | 0% |
| Index Kepuasan Pencari Keadilan | 70% | 77,99% | 111,41% |

Sasaran Strategis II :

Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

| NO | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | PERSENTASE |
|-----|--|--------|-----------|------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 2 | Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu | 95% | 70,59% | 74,3% |
| | Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu | 95% | 94,37% | 99,34% |
| | Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi | 2% | 5,88% | 294,12% |
| | Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu | 95% | 100% | 105,26% |
| | Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus | 90% | 100% | 111,41% |

Sasaran Strategis III :

Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

| NO | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | PERSENTASE |
|-----|--|--------|-----------|------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 3 | Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang | 5% | 0% | 0% |

| | | | | |
|--|---|--|--|--|
| | Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) | | | |
|--|---|--|--|--|

| Sasaran Strategis IV : | | | | |
|--|---|--------|-----------|------------|
| Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan | | | | |
| NO | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | PERSENTASE |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 4 | Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi) | 90% | 100% | 111,41% |



BAB I PENDAHULUAN



BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Reformasi yang terjadi di Indonesia membuat segenap komponen bangsa berlomba untuk memperbaiki dan mengembangkan sistem, tata kelola dan upaya-upaya lainnya yang menuju pada perbaikan. Demikian pula dengan Aparatur Negara sebagai salah satu pilar untuk mewujudkan masyarakat madani dan sejahtera dituntut untuk meningkatkan kapasitas dan kinerjanya demi keberlangsungan pembangunan nasional.

Reformasi Birokrasi telah menjadi isu sentral dalam penataan pemerintahan dan pendayagunaan segenap aparatur negara, sehingga reformasi birokrasi dan tata kelola menjadi prioritas utama dalam Pembangunan Nasional sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Presiden nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019.

Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana Kekuasaan Yudikatif, serta sebagai Peradilan Negara yang tertinggi beserta badan-badan peradilan dibawahnya tak luput juga dituntut untuk menerapkan Reformasi Birokrasi. Mahkamah Agung tidak hanya bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kekuasaan kehakiman di Indonesia tetapi juga sebagai puncak manajemen dibidang administrasi, personil, dan finansial serta sarana dan prasarana. Kebijakan satu atap memberikan tanggung jawab dan tantangan karena Mahkamah Agung Republik Indonesia dituntut untuk menunjukkan kemampuannya guna mewujudkan organisasi sebagai lembaga yang profesional, efektif, efisien, transparan serta akuntabel dalam kerangka pembaharuan peradilan yang komprehensif dan sistematis demi tercapainya cita-cita pembaharuan badan peradilan secara utuh.

Penyusunan LKjiP Pengadilan Negeri Pulang Pisau ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan secara teknis berpedoman pada Peraturan Kementerian PAN dan RB

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan faktor penting dalam meningkatkan pelayanan publik. Langkah untuk mewujudkan hal tersebut telah dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang diantaranya adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010–2025.

Dalam mewujudkan hal tersebut di atas, Pengadilan Negeri Pulang Pisau telah berupaya semaksimal mungkin meningkatkan kualitas SAKIP untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja lembaga peradilan yang baik dan dipercaya oleh publik. Sasaran yang diinginkan dalam akuntabilitas kinerja adalah menjadikan Pengadilan Negeri Pulang Pisau akuntabel dalam melaksanakan aktivitas, responsif, transparan dan dipercaya masyarakat dalam pelaksanaan penegakan hukum, yang artinya akan meningkatkan tingkat

B. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Fokus pelaksanaan tugas dan fungsi badan peradilan adalah melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman yang efektif, yaitu memutuskan suatu sengketa/menyelesaikan suatu masalah hukum guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dengan didasari keagungan, keluhuran, dan kemuliaan institusi.

Amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan sifat dan karakter Kekuasaan Kehakiman dengan menyatakan "*Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan*" Di dalam Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga dikemukakan "*Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia*"

1. Kedudukan

Pengadilan Negeri Pulang Pisau (PN Pulang Pisau) adalah Pengadilan tingkat pertama kelas II dibawah Pengadilan Tinggi Palangka Raya dalam naungan Direktorat Jenderal Peradilan Umum dilingkungan Mahkamah Agung RI adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan dengan wilayah Yurisdiksi Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah. Yang meliputi 8 Kecamatan 91 Desa Definiti, 1 Desa Persiapan, 1 UPT Anjir Pulang Pisau dan 2 kelurahan.

2. Tugas

Sesuai Pasal 50 BAB Kekuasaan Pengadilan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, PN Pulang Pisau mempunyai tugas dan wewenang menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya (Perdata maupun Pidana) ditingkat pertama. Tugas lain *in casu* Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasehat tentang hukum kepada instansi Pemerintah di Daerahnya apabila diminta sebagaimana yang diamanatkan Pasal 52 Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, PN Pulang Pisau memiliki fungsi sebagai berikut:

- Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan ;
- Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali serta administrasi perkara lainnya ;
- Memberikan pelayanan internal kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Negeri Pulang Pisau ;

C. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) ini menggambarkan pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Pulang Pisau selama tahun 2019 sebagai acuan untuk perbaikan kinerja dimasa mendatang. Laporan Akuntabilitas ini disusun dengan sistematika sebagaimana diatur dalam PermenPAN & RB Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 yakni sebagai berikut :

- BAB I Pendahuluan,** Bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi yang meliputi Aspek strategisnya berupa kedudukan, tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Pulang Pisau.
- BAB II Perencanaan Kinerja,** pada Bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2019
- BAB III Akuntabilitas Kinerja,** Bab ini menguraikan Capaian Kinerja Organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi dengan melakukan analisis perbandingan target dengan realisasi tahun 2019, perbandingan realisasi kinerja tahun 2019 dengan tahun sebelumnya, perbandingan realisasi kinerja tahun 2019 dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis 2015-2019 PN Pulang Pisau, Analisis keberhasilan/kegagalan program/kegiatan tahun 2019, dan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, dan analisis program/kegiatan yang berhasil menunjang keberhasilan atau menyebabkan kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. Serta Realisasi Anggaran tahun 2019.
- BAB IV Penutup,** Bab ini menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.



PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU KELAS II



BAB II PERENCANAAN KINERJA



Jalan Tingang Menteng No.39, Pulang
Pisau 748111, Kab. Pulang Pisau,
Kalimantan Tengah
Telp. (0513) 2027516



www.pn-pulangpisau.go.id



pnpulangpisau@gmail.com



BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan pembangunan, maka dibuatlah Rencana Strategis (Renstra) yang ditujukan untuk menjawab segala tuntutan lingkungan strategi baik yang bersifat lokal, regional, nasional bahkan tuntutan global dalam tatanan sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyusunan Renstra tentu melalui pendekatan strategis yang konkrit, agar Pengadilan Negeri Pulang Pisau dapat merealisasikan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Pulang Pisau yaitu selalu berusaha untuk meningkatkan mutu pelayanannya terhadap masyarakat pencari keadilan, dengan cara menanamkan rasa memiliki dan meningkatkan kedisiplinan melalui tertib administrasi dan tertib perkantoran, serta menjalankan tugas secara profesional dengan penuh rasa tanggung jawab. Pada hakekatnya Rencana Strategis Pengadilan Negeri Pulang Pisau merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui pembinaan, penataan, perbaikan, penertiban, penyempurnaan, dan pembaharuan terhadap sistem, kebijakan termasuk pembinaan terhadap akhlak dan perilaku aparatur negara serta pengawasan dan pengendalian manajemen, agar tercapai efektivitas, efisiensi dan produktivitas.

1. VISI DAN MISI

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan. Visi Mahkamah Agung yang berhasil dirumuskan pada 10 September 2009 adalah *"TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG"* Visi Badan Peradilan tersebut di atas, dirumuskan dengan merujuk pada

Pembukaan UUD 1945, terutama alinea kedua dan alinea keempat sebagai tujuan Negara Republik Indonesia.

Melalui visi ini, ingin menjadikan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya sebagai lembaga yang dihormati, dimana didalamnya dikelola oleh hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan dan kebesaran serta keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas pokoknya. Sehingga Pengadilan Negeri Pulang Pisau menetapkan visi sebagai berikut :

“TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU YANG AGUNG.”

Pengadilan Negeri Pulang Pisau menetapkan misi sesuai dengan misi Mahkamah Agung dalam cetak biru Pembaruan Peradilan yakni sebagai berikut:

- 1) Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Pulang Pisau;
- 2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
- 3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Pulang Pisau;
- 4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Pulang Pisau;

Namun Rencana Strategis 2015 – 2019 Pengadilan Negeri Pulang Pisau memperbaharui Misinya dengan menyesuaikan dan menyelaraskan dengan Misi yang termuat dalam Renstra Mahkamah Agung, dan Renstra Pengadilan Tinggi Palangka Raya sebagai organisasi induk satuan kerja Pengadilan Negeri Pulang Pisau. Misi tersebut adalah:

1. *Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan di Pengadilan Negeri Pulang Pisau;*
2. *Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan di Pengadilan Negeri Pulang Pisau;*
3. *Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau.*

2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Dari uraian sebelumnya, ingin disampaikan bahwa yang menjadi tujuan utama Pengadilan Negeri Pulang Pisau adalah bisa menjadi PENGADILAN NEGERI YANG AGUNG. Pengadilan Negeri Pulang Pisau dalam mencapai Visi tersebut menetapkan tujuan sebagai berikut :

1. *Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;*
2. *Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi;*
3. *Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;*
4. *Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.*

Sasaran strategis Pengadilan Negeri Pulang Pisau adalah:

1. *Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;*
2. *Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara;*
3. *Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;*
4. *Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan;*
5. *Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal;*
6. *Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan berdasarkan parameter obyektif;*
7. *Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien.*

3. PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN POKOK

Tujuh sasaran strategis tersebut merupakan arah bagi Pengadilan Negeri Pulang Pisau untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

Dalam mewujudkan sasaran strategis ini ditetapkan Indikator Kinerja sebagai berikut:

- *Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan*
- *Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan*
- *Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu*
- *Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu*
- *Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding*
- *Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi*

- *Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali*
- *Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi*
- *Index Kepuasan Pencari Keadilan*

2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.

Indikator kinerjanya adalah sebagai berikut :

Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu

- *Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu*
- *Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi*
- *Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu*
- *Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus*

3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

Indikator kinerjanya adalah sebagai berikut :

- *Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)*

4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Indikator kinerjanya adalah sebagai berikut :

- *Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (Dieksekusi)*

Pada Tahun 2019, Pengadilan Negeri Pulang Pisau menetapkan target pencapaian rencana kinerja sebagai berikut :

Unit Organisasi : PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU

Tahun Anggaran : 2019

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | TARGET |
|-----|--|---|--------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, | Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan | 100% |
| | | Persentase Sisa Perkara Pidana yang | 100% |

| | | | |
|---|---|--|-----|
| | dan Akuntabel | Diselesaikan | |
| | | Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu | 95% |
| | | Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu | 95% |
| | | Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding | 70% |
| | | Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi | 80% |
| | | Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali | 90% |
| | | Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi | 2% |
| | | Index Kepuasan Pencari Keadilan | 70% |
| 2 | Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara | Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu | 95% |
| | | Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu | 95% |
| | | Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi | 2% |
| | | Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu | 95% |
| | | Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus | 90% |
| 3 | Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan | Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) | 5% |
| 4 | Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan | Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi) | 90% |



PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU KELAS II



BAB II PERENCANAAN KINERJA



Jalan Tingang Menteng No.39, Pulang
Pisau 748111, Kab. Pulang Pisau,
Kalimantan Tengah
Telp. (0513) 2027516



www.pn-pulangpisau.go.id
pn-pulangpisau@gmail.com



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi sedangkan Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi.

Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan *reward/punishment*, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Untuk mengukur sejauh mana pencapaian kinerja tersebut telah mendekati perwujudan Visi, misi, tujuan dan sasaran strategisnya maka harus dilakukan pengukuran dalam beberapa kriteria, antara lain :

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2019
2. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2019 dengan capaian kinerja tahun 2018
3. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2019 dengan target jangka menengah dalam dokumen Rencana Strategis PN Pulang Pisau

Oleh sebab itu untuk mengukur capaian kinerja PN Pulang Pisau pada tahun 2019 ini, maka akan diuraikan sebagai berikut:

A.1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja tahun 2019

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Pulang Pisau di tahun 2019 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang

telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak.

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2019 ini. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel dibawah ini :

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | PERSENTAS E |
|--|--|---|--|---|-------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel | Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan | 100% | 100% | 100% |
| | | Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan | 100% | 100% | 100% |
| | | Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu | 95% | 82,35% | 86,68% |
| | | Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu | 95% | 99,3% | 104,53 % |
| | | Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding | 70% | 93,33 % | 103,33 % |
| | | Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi | 80% | 98,11 % | 122,64 % |
| | | Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali | 90% | 100% | 111,11% |
| | | Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi | 2% | 0% | 0% |
| | | Index Kepuasan Pencari Keadilan | 70% | 77,99% | 111,41% |
| | | 2 | Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara | Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu | 95% |
| Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu | 95% | | | 94,37% | 99,34% |
| Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi | 2% | | | 5,88% | 294,12% |

| | | | | | |
|---|---|--|-----|------|---------|
| | | Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu | 95% | 100% | 105,26% |
| | | Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus | 90% | 100% | 111,41% |
| 3 | Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan | Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) | 5% | 0% | 0% |
| 4 | Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan | Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi) | 90% | 100% | 111,41% |

Capaian hasil pengukuran kinerja diatas didapat dengan membandingkan realisasi pekerjaan yang berhasil dilaksanakan dengan target tahunan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2019. Sumber data pencapaian realisasi kinerja adalah Laporan Bulanan, Laporan Tahunan, dan data dari masing-masing kepaniteraan dan sub bagian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Capaian hasil kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel

Dalam sasaran terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel terdiri atas 9 (sembilan) Indikator Kinerja Utama yaitu :

1. Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan
2. Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan
3. Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu
4. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu
5. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding
6. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi
7. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali
8. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi
9. Index Kepuasan Pencari Keadilan

Adapun pencapaian target kinerja Pengadilan Negeri Pulang Pisau Tahun 2019 pada sasaran ini dapat digambarkan sebagai berikut :

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | PERSENTASE |
|-----|--|---|--------|-----------|------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel | Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan | 100% | 100% | 100% |
| | | Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan | 100% | 100% | 100% |
| | | Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu | 95% | 82,35% | 86,68% |
| | | Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu | 95% | 99,3% | 104,53 % |
| | | Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding | 70% | 93,33 % | 103,33 % |
| | | Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi | 80% | 98,11 % | 122,64 % |
| | | Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali | 90% | 100% | 111,11% |
| | | Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi | 2% | 0% | 0% |
| | | Index Kepuasan Pencari Keadilan | 70% | 77,99% | 111,41% |

a. Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan

Untuk indikator Persentase Sisa Perkara Perdata tahun lalu yang diselesaikan pada tahun 2019 ditetapkan target sebesar 100%.

Pengadilan Negeri Pulang Pisau beroperasi pada tanggal 01 Nopember 2019, sehingga dalam kurun waktu 2 bulan tersebut, Pengadilan Negeri Pulang Pisau belum ada menerima Perkara Perdata. Sehingga tidak ada perkara yang menjadi tunggakan sisa tahun lalu pada awal tahun 2019. Adapun sumber indikator ini adalah Laporan Bulanan yang diuraikan sebagai berikut:

| No | Jenis Perkara | Sisa Perkara tahun 2018 (Per 01 Januari 2019) | Putusan Perkara (Sisa Perkara Tahun 2018) | | | | | | | | | | | | Jumlah Perkara Tahun 2018 Yang Belum Putus (Per 31 Desember 2019) | | |
|----|----------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|---|--|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | |
| 1 | Perkara Perdata Gugatan | Nihil | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 2 | Perkara Perdata Permohonan | Nihil | | | | | | | | | | | | | | | 0 |

Indikator ini dihitung sebagai berikut:

Persentase Indikator

$$= \frac{\text{Jumlah Sisa Perkara Perdata tahun 2018 yang Diselesaikan Per 31 Desember 2019}}{\text{Jumlah Sisa Perkara Perdata 2018 Yang Harus Diselesaikan Tahun 2019}} \times 100\%$$

$$\text{Persentase Indikator} = \frac{0}{0} \times 100\%$$

$$\text{Persentase Indikator} = 100\%$$

Sehingga untuk indikator ini Realisasi adalah 100%, sedangkan target yang ingin dicapai pada Indikator ini adalah 100% sehingga jika dipersentasekan, maka nilai Indikator ini adalah 100 Persen sebagaimana perhitungan di bawah ini:

$$\text{Nilai Indikator} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Nilai Indikator} = \frac{100\%}{100\%} \times 100\%$$

$$\text{Nilai Indikator} = 100\%$$

b. Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan

Untuk indikator **Persentase Sisa Perkara Pidana tahun lalu yang diselesaikan** pada tahun 2019 ditetapkan target sebesar 100%. Jumlah Perkara Pidana yang belum putus pada tahun 2018 yang menjadi Sisa Perkara Pidana tahun yang lalu pada awal tahun 2019 berjumlah 8 Perkara. Adapun sumber indikator ini adalah dari Laporan Bulanan sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

| No | Jenis Perkara | Sisa Perkara tahun 2018 (Per 01 Januari 2019) | Putusan Perkara (Sisa Perkara Tahun 2018) | | | | | | | | | | | | Jumlah Perkara Tahun 2018 Yang Belum Putus (Per 31 Desember 2019) |
|---------------|--------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1 | Pidana Biasa | 8 | 5 | 3 | | | | | | | | | | | 0 |
| 2 | Pidana Singkat | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 3 | Pidana Cepat | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 4 | Pra Peradilan | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 5 | Pidana Anak | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 6 | Pidana Lalu Lintas | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Jumlah | | 8 | 5 | 3 | | | | | | | | | | | 0 |

8 Perkara Pidana yang Belum Putus pada awal tahun terdiri atas 8 Perkara Pidana Biasa. Dari 8 Perkara tersebut, 5 Perkara Putus pada bulan Januari 2019, sedangkan 3 Perkara Putus pada Bulan Pebruari 2019. Sehingga per 31 Januari 2019 tidak ada Perkara Pidana tahun 2018 yang belum Putus. Adapun Perkara Pidana sisa tahun 2018 yang Putus diuraikan sebagai berikut:

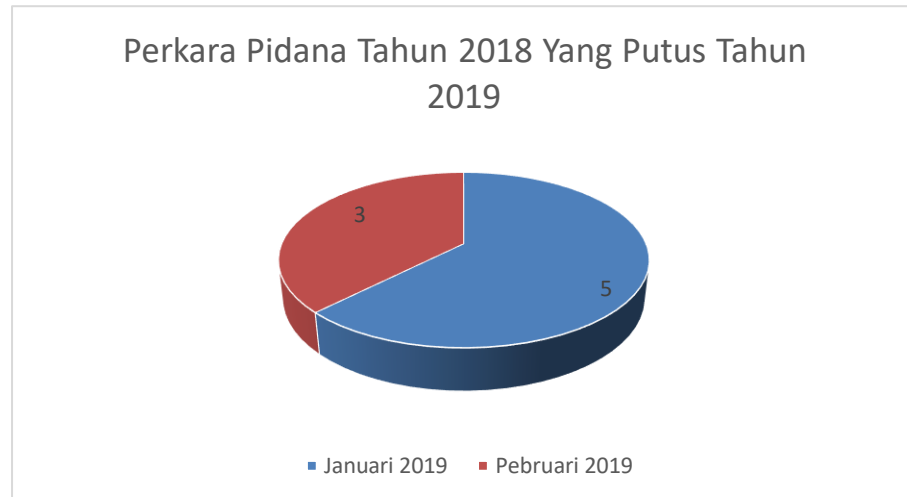
Sisa Perkara Pidana Tahun 2018 yang Putus Bulan Januari 2019

| No | Nomor Perkara | Tanggal Putusan |
|----|------------------------|-----------------|
| 1 | 10/Pid.B/2018/PN Pps | 2019-01-03 |
| 2 | 11/Pid.B/2018/PN Pps | 2019-01-03 |
| 3 | 9/Pid.B/2018/PN Pps | 2019-01-07 |
| 4 | 12/Pid.Sus/2018/PN Pps | 2019-01-17 |
| 5 | 13/Pid.B/2018/PN Pps | 2019-01-30 |

Sisa Perkara Pidana Tahun 2018 yang Putus Bulan Pebruari 2019

| No | Nomor Perkara | Tanggal Putusan |
|----|------------------------|-----------------|
| 1 | 15/Pid.Sus/2018/PN Pps | 2019-02-06 |
| 2 | 14/Pid.Sus/2018/PN Pps | 2019-02-19 |
| 3 | 8/Pid.Sus/2018/PN Pps | 2019-02-27 |

Jika dibuat diagram adalah sebagai berikut:



Indikator ini dihitung sebagai berikut:

Persentase Indikator

$$= \frac{\text{Jumlah Sisa Perkara Pidana tahun 2018 yang Diselesaikan Per 31 Desember 2019}}{\text{Jumlah Sisa Perkara Pidana Tahun 2018 Yang Harus Diselesaikan Tahun 2019}} \times 100\%$$

$$\text{Persentase Indikator} = \frac{8}{8} \times 100\%$$

$$\text{Persentase Indikator} = 100\%$$

Sehingga untuk indikator ini Realisasi adalah 100%, sedangkan target yang ingin dicapai pada Indikator ini adalah 100% sehingga jika dipersentasekan, maka nilai Indikator ini adalah 100 Persen sebagaimana perhitungan di bawah ini:

$$\text{Nilai Indikator} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Nilai Indikator} = \frac{100\%}{100\%} \times 100\%$$

$$\text{Nilai Indikator} = 100\%$$

c. Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu

Untuk Mengetahui Indikator ini, maka harus diketahui jumlah Perkara Perdata Sisa tahun 2018 dan perkara Perdata yang masuk selama tahun 2019.

| No | Jenis Perkara | Sisa Perkara tahun 2018 (Per 01 Januari 2019) | Info | Putusan Perkara (Sisa Perkara Tahun 2018) | | | | | | | | | | | | Jumlah Perkara Tahun 2018 Yang Belum Putus (Per 31 Desember 2019) |
|----|-----------------------------------|---|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|---|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1 | Perkara Perdata Gugatan | Nihil | Masuk | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 7 | 2 | 24 |
| | | | Putus | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 12 |
| 2 | Perkara Perdata Permohonan | Nihil | Masuk | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| | | | Putus | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 3 | Perkara Perdata Gugatan Sederhana | Nihil | Masuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Putus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Selama tahun 2019, terdapat Perkara Gugatan yang masuk sebanyak 24 Perkara dan sudah putus selama tahun 2019 sejumlah 12 perkara. Selama tahun 2019 tidak ada Gugatan Sederhana yang masuk, sedangkan Perkara Perdata Permohonan masuk sebanyak 5 Perkara Permohonan dan sudah putus sebanyak 5 perkara permohonan. Adapun Diagram Batang Perkara Perdata adalah sebagai berikut:



Sehingga Perkara Perdata yang putus selama tahun 2019 berjumlah 17 Perkara. Untuk mengukur Indikator ini adalah dengan menghitung Jarak antara Register Berkas Perkara yang masuk dengan Tanggal Putusan. Adapun sumber untuk mengukur ini indikator ini adalah Laporan Bulanan yang diuraikan sebagai berikut:

| No | Nama Perkara | Tanggal Pendaftaran | Tanggal Putus | Selisih Waktu (Bulan) |
|----|----------------------|---------------------|------------------|-----------------------|
| 1 | 1/Pdt.G/2019/PN Pps | 07 Januari 2019 | 14 Agustus 2019 | 7.3 |
| 2 | 4/Pdt.G/2019/PN Pps | 18 Maret 2019 | 09 Oktober 2019 | 6.83 |
| 3 | 6/Pdt.G/2019/PN Pps | 16 April 2019 | 10 Oktober 2019 | 5.9 |
| 4 | 14/Pdt.G/2019/PN Pps | 28 Agustus 2019 | 18 Desember 2019 | 3.73 |
| 5 | 2/Pdt.G/2019/PN Pps | 12 Februari 2019 | 23 Mei 2019 | 3.33 |
| 6 | 3/Pdt.G/2019/PN Pps | 12 Maret 2019 | 16 Mei 2019 | 2.17 |
| 7 | 5/Pdt.G/2019/PN Pps | 21 Maret 2019 | 20 Mei 2019 | 2 |
| 8 | 10/Pdt.G/2019/PN Pps | 12 Juni 2019 | 25 Juli 2019 | 1.43 |
| 9 | 16/Pdt.G/2019/PN Pps | 21 November 2019 | 18 Desember 2019 | 0.9 |
| 10 | 7/Pdt.G/2019/PN Pps | 03 Mei 2019 | 27 Mei 2019 | 0.8 |
| 11 | 8/Pdt.G/2019/PN Pps | 03 Mei 2019 | 27 Mei 2019 | 0.8 |
| 12 | 2/Pdt.P/2019/PN Pps | 05 Maret 2019 | 20 Maret 2019 | 0.5 |
| 13 | 4/Pdt.P/2019/PN Pps | 05 April 2019 | 16 April 2019 | 0.37 |
| 14 | 20/Pdt.G/2019/PN Pps | 29 November 2019 | 09 Desember 2019 | 0.33 |
| 15 | 3/Pdt.P/2019/PN Pps | 06 Maret 2019 | 14 Maret 2019 | 0.27 |
| 16 | 1/Pdt.P/2019/PN Pps | 18 Februari 2019 | 25 Februari 2019 | 0.23 |
| 17 | 5/Pdt.P/2019/PN Pps | 26 Agustus 2019 | 27 Agustus 2019 | 0.03 |

Indikator ini dihitung sebagai berikut:

$$\text{Persentase Indikator} = \frac{\text{Jumlah Perkara Perdata yang Putus} < 5 \text{ Bulan}}{\text{Jumlah Perkara Perdata Yang Putus 2019}} \times 100\%$$

$$\text{Persentase Indikator} = \frac{14}{17} \times 100\%$$

$$\text{Persentase Indikator} = 82,35 \%$$

Sehingga untuk indikator ini Realisasi adalah 100%, sedangkan target yang ingin dicapai pada Indikator ini adalah 100% sehingga jika dipersentasikan, maka nilai Indikator ini adalah 100 Persen sebagaimana perhitungan di bawah ini:

$$\text{Nilai Indikator} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Nilai Indikator} = \frac{82,35\%}{95\%} \times 100\%$$

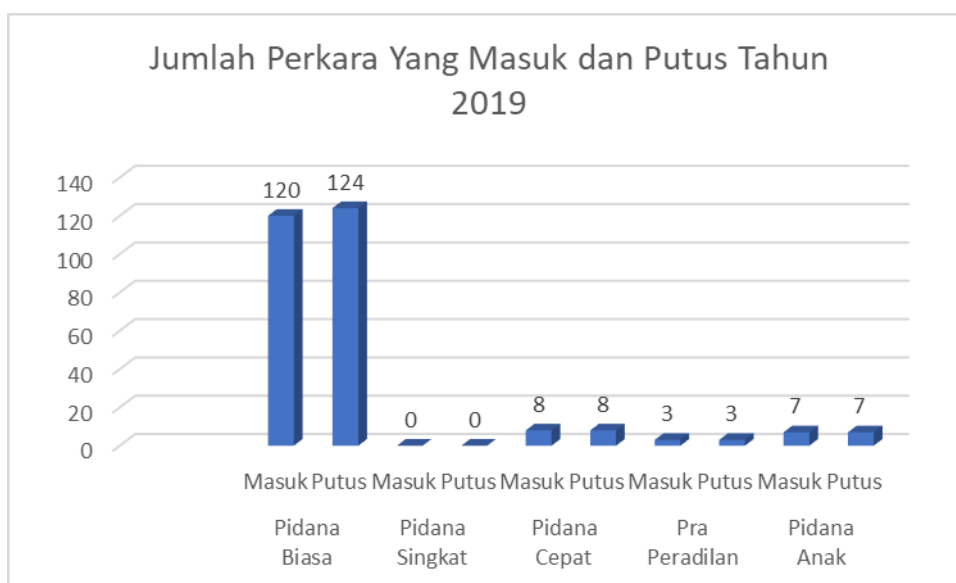
$$\text{Nilai Indikator} = 86,68\%$$

d. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu

Untuk Mengetahui Indikator ini, maka harus diketahui jumlah Perkara Pidana Sisa tahun 2018 dan perkara Pidana yang masuk selama tahun 2019.

| No | Jenis Perkara | Sisa Perkara tahun 2018 | Info | Putusan Perkara (Sisa Perkara Tahun 2018) | | | | | | | | | | | | Jumlah Perkara Yang Masuk dan Putus |
|---|--------------------|-------------------------|-------|---|-----|-----|----|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------------------------------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1 | Pidana Biasa | 8 | Masuk | 9 | 8 | 16 | 16 | 20 | 3 | 8 | 8 | 6 | 12 | 9 | 5 | 120 |
| | | | Putus | 5 | 12 | 8 | 13 | 19 | 12 | 8 | 11 | 0 | 17 | 4 | 15 | 124 |
| 2 | Pidana Singkat | 0 | Masuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Putus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Pidana Cepat | 0 | Masuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| | | | Putus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 4 | Pra Peradilan | 0 | Masuk | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| | | | Putus | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | Pidana Anak | 0 | Masuk | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| | | | Putus | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 6 | Pidana Lalu Lintas | 0 | Masuk | 172 | 248 | 107 | 95 | 125 | 56 | 148 | 139 | 600 | 111 | 493 | 255 | 2549 |
| | | | Putus | 172 | 248 | 107 | 95 | 125 | 56 | 148 | 139 | 600 | 111 | 493 | 255 | 2549 |
| Jumlah Perkara (Diluar Pidana Lalu Lintas) | | | Masuk | 11 | 10 | 18 | 16 | 20 | 3 | 15 | 9 | 8 | 13 | 9 | 6 | 138 |
| | | | Putus | 6 | 14 | 11 | 13 | 19 | 12 | 15 | 12 | 2 | 18 | 4 | 16 | 142 |

Selama tahun 2019, terdapat Perkara Pidana yang masuk sebanyak 138 Perkara, sedangkan Terdapat 8 Perkara Pidana Sisa tahun 2018. Adapun Perkara Pidana yang masuk terdiri dari 120 Perkara Pidana Biasa, 8 Perkara Pidana Cepat, 3 Perkara Praperadilan, dan 7 Perkara Pidana anak. Dari Perkara yang masuk tersebut sudah putus 142 Perkara termasuk perkara sisa tahun 2018. Adapun Jumlah Perkara Pidana yang sudah Putus terdiri dari 124 Perkara Pidana Biasa, 8 Perkara Pidana Cepat, 3 Perkara Praperadilan dan 7 Perkara Pidana Anak. Adapun Diagram Batang Perkara Perdata adalah sebagai berikut:



Sehingga Perkara Pidana yang putus selama tahun 2019 berjumlah 142 Perkara. Untuk mengukur Indikator ini adalah dengan menghitung Jarak antara Register Berkas Perkara yang masuk dengan Tanggal Putusan. Adapun sumber untuk mengukur ini indikator ini adalah Laporan Bulanan yang diuraikan sebagai berikut:

| No | Nama Perkara | Tanggal Pendaftaran | Tanggal Putus | Selisih Waktu (Bulan) |
|----|-------------------------|---------------------|---------------|-----------------------|
| 1 | 28/Pid.B/2019/PN Pps | 2019-03-15 | 2019-10-17 | 7.20 |
| 2 | 47/Pid.Sus/2019/PN Pps | 2019-04-16 | 2019-08-06 | 3.73 |
| 3 | 8/Pid.Sus/2018/PN Pps | 2018-11-13 | 2019-02-27 | 3.53 |
| 4 | 40/Pid.Sus/2019/PN Pps | 2019-04-09 | 2019-07-23 | 3.50 |
| 5 | 41/Pid.Sus/2019/PN Pps | 2019-04-16 | 2019-07-10 | 2.83 |
| 6 | 79/Pid.B/2019/PN Pps | 2019-07-18 | 2019-10-07 | 2.70 |
| 7 | 25/Pid.B/2019/PN Pps | 2019-03-11 | 2019-05-29 | 2.63 |
| 8 | 27/Pid.Sus/2019/PN Pps | 2019-03-14 | 2019-05-29 | 2.53 |
| 9 | 53/Pid.Sus/2019/PN Pps | 2019-05-09 | 2019-07-24 | 2.53 |
| 10 | 88/Pid.Sus/2019/PN Pps | 2019-08-22 | 2019-11-06 | 2.53 |
| 11 | 14/Pid.Sus/2018/PN Pps | 2018-12-06 | 2019-02-19 | 2.50 |
| 12 | 101/Pid.Sus/2019/PN Pps | 2019-10-10 | 2019-12-18 | 2.30 |
| 13 | 87/Pid.Sus/2019/PN Pps | 2019-08-21 | 2019-10-24 | 2.13 |
| 14 | 97/Pid.B/2019/PN Pps | 2019-10-08 | 2019-12-11 | 2.13 |
| 15 | 99/Pid.B/2019/PN Pps | 2019-10-08 | 2019-12-11 | 2.13 |
| 16 | 103/Pid.B/2019/PN Pps | 2019-10-15 | 2019-12-18 | 2.13 |
| 17 | 93/Pid.Sus/2019/PN Pps | 2019-09-04 | 2019-11-06 | 2.10 |
| 18 | 15/Pid.Sus/2018/PN Pps | 2018-12-06 | 2019-02-06 | 2.07 |
| 19 | 10/Pid.Sus/2019/PN Pps | 2019-02-04 | 2019-04-04 | 1.97 |
| 20 | 13/Pid.B/2018/PN Pps | 2018-12-03 | 2019-01-30 | 1.93 |

| | | | | |
|----|--------------------------|------------|------------|------|
| 21 | 71/Pid.B/2019/PN Pps | 2019-06-24 | 2019-08-21 | 1.93 |
| 22 | 82/Pid.B/2019/PN Pps | 2019-08-13 | 2019-10-10 | 1.93 |
| 23 | 83/Pid.Sus/2019/PN Pps | 2019-08-13 | 2019-10-10 | 1.93 |
| 24 | 84/Pid.Sus/2019/PN Pps | 2019-08-13 | 2019-10-10 | 1.93 |
| 25 | 32/Pid.B/2019/PN Pps | 2019-03-25 | 2019-05-21 | 1.90 |
| 26 | 86/Pid.Sus/2019/PN Pps | 2019-08-20 | 2019-10-16 | 1.90 |
| 27 | 56/Pid.Sus/2019/PN Pps | 2019-05-16 | 2019-07-10 | 1.83 |
| 28 | 109/Pid.B/LH/2019/PN Pps | 2019-11-06 | 2019-12-30 | 1.80 |
| 29 | 29/Pid.Sus/2019/PN Pps | 2019-03-18 | 2019-05-09 | 1.73 |
| 30 | 34/Pid.B/2019/PN Pps | 2019-04-01 | 2019-05-21 | 1.67 |
| 31 | 64/Pid.Sus/2019/PN Pps | 2019-05-22 | 2019-07-11 | 1.67 |
| 32 | 92/Pid.B/2019/PN Pps | 2019-09-04 | 2019-10-24 | 1.67 |
| 33 | 14/Pid.B/2019/PN Pps | 2019-02-22 | 2019-04-11 | 1.60 |
| 34 | 12/Pid.Sus/2018/PN Pps | 2018-12-03 | 2019-01-17 | 1.50 |
| 35 | 107/Pid.B/2019/PN Pps | 2019-11-04 | 2019-12-18 | 1.47 |
| 36 | 42/Pid.Sus/2019/PN Pps | 2019-04-16 | 2019-05-29 | 1.43 |
| 37 | 43/Pid.Sus/2019/PN Pps | 2019-04-16 | 2019-05-29 | 1.43 |
| 38 | 46/Pid.Sus/2019/PN Pps | 2019-04-16 | 2019-05-29 | 1.43 |
| 39 | 59/Pid.B/2019/PN Pps | 2019-05-22 | 2019-07-04 | 1.43 |
| 40 | 73/Pid.Sus/2019/PN Pps | 2019-07-02 | 2019-08-14 | 1.43 |
| 41 | 52/Pid.B/LH/2019/PN Pps | 2019-05-09 | 2019-06-20 | 1.40 |
| 42 | 100/Pid.B/2019/PN Pps | 2019-10-10 | 2019-11-21 | 1.40 |
| 43 | 105/Pid.B/LH/2019/PN Pps | 2019-10-23 | 2019-12-04 | 1.40 |
| 44 | 110/Pid.Sus/2019/PN Pps | 2019-11-06 | 2019-12-18 | 1.40 |
| 45 | 9/Pid.B/2018/PN Pps | 2018-11-27 | 2019-01-07 | 1.37 |
| 46 | 13/Pid.B/2019/PN Pps | 2019-02-20 | 2019-04-02 | 1.37 |
| 47 | 112/Pid.B/2019/PN Pps | 2019-11-07 | 2019-12-18 | 1.37 |
| 48 | 6/Pid.B/2019/PN Pps | 2019-01-17 | 2019-02-26 | 1.33 |
| 49 | 16/Pid.B/2019/PN Pps | 2019-02-22 | 2019-04-02 | 1.30 |
| 50 | 35/Pid.Sus/2019/PN Pps | 2019-04-01 | 2019-05-09 | 1.27 |
| 51 | 89/Pid.B/2019/PN Pps | 2019-09-02 | 2019-10-10 | 1.27 |
| 52 | 10/Pid.B/2018/PN Pps | 2018-11-27 | 2019-01-03 | 1.23 |
| 53 | 11/Pid.B/2018/PN Pps | 2018-11-27 | 2019-01-03 | 1.23 |
| 54 | 37/Pid.Sus/2019/PN Pps | 2019-04-02 | 2019-05-09 | 1.23 |
| 55 | 39/Pid.Sus/2019/PN Pps | 2019-04-08 | 2019-05-15 | 1.23 |
| 56 | 45/Pid.B/2019/PN Pps | 2019-04-16 | 2019-05-23 | 1.23 |
| 57 | 90/Pid.B/2019/PN Pps | 2019-09-03 | 2019-10-10 | 1.23 |
| 58 | 48/Pid.Sus/2019/PN Pps | 2019-04-23 | 2019-05-29 | 1.20 |
| 59 | 50/Pid.B/2019/PN Pps | 2019-05-06 | 2019-06-11 | 1.20 |
| 60 | 91/Pid.B/LH/2019/PN Pps | 2019-09-04 | 2019-10-10 | 1.20 |
| 61 | 1/Pid.B/2019/PN Pps | 2019-01-02 | 2019-02-06 | 1.17 |
| 62 | 2/Pid.B/2019/PN Pps | 2019-01-02 | 2019-02-06 | 1.17 |
| 63 | 7/Pid.B/2019/PN Pps | 2019-01-22 | 2019-02-26 | 1.17 |
| 64 | 8/Pid.Sus/2019/PN Pps | 2019-01-22 | 2019-02-26 | 1.17 |
| 65 | 44/Pid.B/2019/PN Pps | 2019-04-16 | 2019-05-21 | 1.17 |
| 66 | 74/Pid.Sus/2019/PN Pps | 2019-07-11 | 2019-08-15 | 1.17 |

| | | | | |
|-----|----------------------------|------------|------------|------|
| 67 | 75/Pid.Sus/2019/PN Pps | 2019-07-11 | 2019-08-15 | 1.17 |
| 68 | 76/Pid.Sus/2019/PN Pps | 2019-07-11 | 2019-08-15 | 1.17 |
| 69 | 77/Pid.Sus/2019/PN Pps | 2019-07-11 | 2019-08-15 | 1.17 |
| 70 | 78/Pid.Sus/2019/PN Pps | 2019-07-11 | 2019-08-15 | 1.17 |
| 71 | 49/Pid.B/LH/2019/PN Pps | 2019-04-23 | 2019-05-27 | 1.13 |
| 72 | 58/Pid.B/2019/PN Pps | 2019-05-22 | 2019-06-25 | 1.13 |
| 73 | 63/Pid.Sus/2019/PN Pps | 2019-05-22 | 2019-06-25 | 1.13 |
| 74 | 3/Pid.B/2019/PN Pps | 2019-01-04 | 2019-02-06 | 1.10 |
| 75 | 15/Pid.Sus/2019/PN Pps | 2019-02-22 | 2019-03-27 | 1.10 |
| 76 | 17/Pid.Sus/2019/PN Pps | 2019-02-22 | 2019-03-27 | 1.10 |
| 77 | 115/Pid.Sus/2019/PN Pps | 2019-11-21 | 2019-12-23 | 1.07 |
| 78 | 108/Pid.B/2019/PN Pps | 2019-11-04 | 2019-12-05 | 1.03 |
| 79 | 4/Pid.B/2019/PN Pps | 2019-01-08 | 2019-02-06 | 0.97 |
| 80 | 5/Pid.Sus/2019/PN Pps | 2019-01-08 | 2019-02-06 | 0.97 |
| 81 | 21/Pid.B/2019/PN Pps | 2019-03-11 | 2019-04-09 | 0.97 |
| 82 | 22/Pid.B/2019/PN Pps | 2019-03-11 | 2019-04-09 | 0.97 |
| 83 | 80/Pid.B/2019/PN Pps | 2019-07-24 | 2019-08-22 | 0.97 |
| 84 | 60/Pid.B/2019/PN Pps | 2019-05-22 | 2019-06-19 | 0.93 |
| 85 | 62/Pid.Sus/2019/PN Pps | 2019-05-22 | 2019-06-19 | 0.93 |
| 86 | 72/Pid.Sus/2019/PN Pps | 2019-06-25 | 2019-07-23 | 0.93 |
| 87 | 18/Pid.B/2019/PN Pps | 2019-03-06 | 2019-04-02 | 0.90 |
| 88 | 19/Pid.B/2019/PN Pps | 2019-03-06 | 2019-04-02 | 0.90 |
| 89 | 31/Pid.B/2019/PN Pps | 2019-03-20 | 2019-04-16 | 0.90 |
| 90 | 61/Pid.Sus/2019/PN Pps | 2019-05-22 | 2019-06-18 | 0.90 |
| 91 | 67/Pid.Sus/2019/PN Pps | 2019-05-23 | 2019-06-19 | 0.90 |
| 92 | 68/Pid.Sus/2019/PN Pps | 2019-05-23 | 2019-06-19 | 0.90 |
| 93 | 69/Pid.B/2019/PN Pps | 2019-05-23 | 2019-06-19 | 0.90 |
| 94 | 94/Pid.B/2019/PN Pps | 2019-09-05 | 2019-10-02 | 0.90 |
| 95 | 111/Pid.B/2019/PN Pps | 2019-11-07 | 2019-12-04 | 0.90 |
| 96 | 9/Pid.B/2019/PN Pps | 2019-01-24 | 2019-02-19 | 0.87 |
| 97 | 65/Pid.B/2019/PN Pps | 2019-05-23 | 2019-06-18 | 0.87 |
| 98 | 66/Pid.B/2019/PN Pps | 2019-05-23 | 2019-06-18 | 0.87 |
| 99 | 51/Pid.B/2019/PN Pps | 2019-05-06 | 2019-05-29 | 0.77 |
| 100 | 12/Pid.Sus/2019/PN Pps | 2019-02-20 | 2019-03-14 | 0.73 |
| 101 | 81/Pid.B/2019/PN Pps | 2019-08-06 | 2019-08-28 | 0.73 |
| 102 | 113/Pid.B/2019/PN Pps | 2019-11-12 | 2019-12-04 | 0.73 |
| 103 | 96/Pid.B/2019/PN Pps | 2019-10-07 | 2019-10-28 | 0.70 |
| 104 | 106/Pid.Sus/2019/PN Pps | 2019-10-23 | 2019-11-13 | 0.70 |
| 105 | 116/Pid.B/2019/PN Pps | 2019-12-02 | 2019-12-23 | 0.70 |
| 106 | 2/Pid.Pra/2019/PN Pps | 2019-01-23 | 2019-02-12 | 0.67 |
| 107 | 30/Pid.Sus/2019/PN Pps | 2019-03-20 | 2019-04-09 | 0.67 |
| 108 | 70/Pid.B/2019/PN Pps | 2019-06-19 | 2019-07-09 | 0.67 |
| 109 | 98/Pid.B/2019/PN Pps | 2019-10-08 | 2019-10-28 | 0.67 |
| 110 | 102/Pid.B/2019/PN Pps | 2019-10-10 | 2019-10-28 | 0.60 |
| 111 | 33/Pid.B/2019/PN Pps | 2019-03-25 | 2019-04-11 | 0.57 |
| 112 | 5/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pps | 2019-09-03 | 2019-09-20 | 0.57 |

| | | | | |
|-----|----------------------------|------------|------------|------|
| 113 | 95/Pid.B/2019/PN Pps | 2019-10-07 | 2019-10-24 | 0.57 |
| 114 | 20/Pid.Sus/2019/PN Pps | 2019-03-11 | 2019-03-27 | 0.53 |
| 115 | 23/Pid.B/2019/PN Pps | 2019-03-11 | 2019-03-27 | 0.53 |
| 116 | 24/Pid.B/2019/PN Pps | 2019-03-11 | 2019-03-27 | 0.53 |
| 117 | 11/Pid.Sus/2019/PN Pps | 2019-02-18 | 2019-03-05 | 0.50 |
| 118 | 54/Pid.Sus/2019/PN Pps | 2019-05-14 | 2019-05-29 | 0.50 |
| 119 | 55/Pid.B/2019/PN Pps | 2019-05-14 | 2019-05-29 | 0.50 |
| 120 | 85/Pid.B/2019/PN Pps | 2019-08-14 | 2019-08-29 | 0.50 |
| 121 | 104/Pid.B/2019/PN Pps | 2019-10-15 | 2019-10-30 | 0.50 |
| 122 | 117/Pid.B/2019/PN Pps | 2019-12-03 | 2019-12-18 | 0.50 |
| 123 | 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pps | 2019-10-08 | 2019-10-22 | 0.47 |
| 124 | 1/Pid.Pra/2019/PN Pps | 2019-01-09 | 2019-01-22 | 0.43 |
| 125 | 26/Pid.B/2019/PN Pps | 2019-03-14 | 2019-03-27 | 0.43 |
| 126 | 57/Pid.B/2019/PN Pps | 2019-05-16 | 2019-05-29 | 0.43 |
| 127 | 36/Pid.B/2019/PN Pps | 2019-04-01 | 2019-04-11 | 0.33 |
| 128 | 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pps | 2019-03-11 | 2019-03-20 | 0.30 |
| 129 | 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pps | 2019-02-20 | 2019-02-28 | 0.27 |
| 130 | 38/Pid.Sus/2019/PN Pps | 2019-04-08 | 2019-04-16 | 0.27 |
| 131 | 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pps | 2019-02-25 | 2019-03-04 | 0.23 |
| 132 | 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pps | 2019-03-14 | 2019-03-20 | 0.20 |
| 133 | 3/Pid.Pra/2019/PN Pps | 2019-08-16 | 2019-08-22 | 0.20 |
| 134 | 6/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pps | 2019-09-04 | 2019-09-09 | 0.17 |
| 135 | 1/Pid.C/2019/PN Pps | 2019-08-05 | 2019-08-05 | 0.00 |
| 136 | 2/Pid.C/2019/PN Pps | 2019-08-29 | 2019-08-29 | 0.00 |
| 137 | 3/Pid.C/2019/PN Pps | 2019-08-29 | 2019-08-29 | 0.00 |
| 138 | 4/Pid.C/2019/PN Pps | 2019-08-29 | 2019-08-29 | 0.00 |
| 139 | 5/Pid.C/2019/PN Pps | 2019-08-29 | 2019-08-29 | 0.00 |
| 140 | 6/Pid.C/2019/PN Pps | 2019-08-29 | 2019-08-29 | 0.00 |
| 141 | 7/Pid.C/2019/PN Pps | 2019-08-29 | 2019-08-29 | 0.00 |
| 142 | 8/Pid.C/2019/PN Pps | 2019-12-12 | 2019-12-12 | 0.00 |

Indikator ini dihitung sebagai berikut:

$$\text{Persentase Indikator} = \frac{\text{Jumlah Perkara Pidana yang Putus < 5 Bulan}}{\text{Jumlah Perkara Pidana Yang Putus 2019}} \times 100\%$$

$$\text{Persentase Indikator} = \frac{141}{142} \times 100\%$$

$$\text{Persentase Indikator} = 99,30 \%$$

Sehingga untuk indikator ini Diperoleh Realisasi adalah 99,30 %, sedangkan target yang ingin dicapai pada Indikator ini adalah 95 % sehingga jika

dipersentasekan, maka nilai Indikator ini adalah 104,53 % sebagaimana perhitungan di bawah ini:

$$\text{Nilai Indikator} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Nilai Indikator} = \frac{99,30\%}{95\%} \times 100\%$$

$$\text{Nilai Indikator} = 104,53\%$$

e. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

Untuk Mengetahui Indikator ini, maka harus diketahui adalah jumlah Perkara yang mengajukan Banding hingga per 31 Desember 2019. Adapun hasil analisis Perkara Yang Putus di Pengadilan Negeri dan yang mengajukan Banding dari 17 Perkara Perdata yang masuk, 1 Perkara mengajukan Banding sedangkan 16 Perkara Tidak mengajukan Banding. Begitupula dengan Perkara Pidana, dari 142 yang putus, 8 mengajukan Banding dan 134 tidak mengajukan Banding.

Adapun data tersebut diuraikan sebagai berikut:

| No | Jenis Perkara | Putus PN | Banding | Tidak Banding |
|----|---------------|----------|---------|---------------|
| 1 | Perdata | 17 | 1 | 16 |
| 2 | Pidana | 142 | 8 | 134 |
| | JUMLAH | 159 | 9 | 150 |

Indikator ini dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned} & \text{Persentase Indikator} \\ & = \frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak banding}}{\text{Jumlah Perkara yang Putus 2019}} \times 100\% \end{aligned}$$

$$\text{Persentase Indikator} = \frac{140}{159} \times 100\%$$

$$\text{Persentase Indikator} = 93,33\%$$

Sehingga untuk indikator ini Realisasi adalah 93,33%, sedangkan target yang ingin dicapai pada Indikator ini adalah 70 % sehingga jika dipersentasekan, maka nilai Indikator ini adalah 103,33 % sebagaimana perhitungan di bawah ini:

$$\text{Nilai Indikator} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Nilai Indikator} = \frac{93,33\%}{70\%} \times 100\%$$

$$\text{Nilai Indikator} = 103,33\%$$

f. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Jumlah Perkara yang mengajukan Kasasi hingga per 31 Desember 2019 adalah 3 Perkara, terdiri dari 1 Perkara Perdata dan 2 Pidana Umum. Adapun data tersebut diuraikan sebagai berikut:

| No | Bulan | Putus PN | Putus PT | Kasasi | Tidak Kasasi |
|--------|---------|----------|----------|--------|--------------|
| 1 | Perdata | 17 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | Pidana | 142 | 7 | 2 | 5 |
| Jumlah | | 159 | 1 | 0 | 1 |

Indikator ini dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned} & \text{Persentase Indikator} \\ & = \frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak kasasi}}{\text{Jumlah Perkara yang Putus 2019}} \times 100\% \end{aligned}$$

$$\text{Persentase Indikator} = \frac{156}{159} \times 100\%$$

$$\text{Persentase Indikator} = 98,11\%$$

Sehingga untuk indikator ini Realisasi adalah 98,11%, sedangkan target yang ingin dicapai pada Indikator ini adalah 80% sehingga jika dipersentasekan, maka nilai Indikator ini adalah 122,64 Persen sebagaimana perhitungan di bawah ini:

$$\text{Nilai Indikator} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Nilai Indikator} = \frac{98,11\%}{80\%} \times 100\%$$

$$\text{Nilai Indikator} = 122,64\%$$

g. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali

Jumlah Perkara yang mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali hingga per 31 Desember 2019 adalah 0 Perkara. Sehingga Indikator ini dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned} & \text{Persentase Indikator} \\ &= \frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak PK}}{\text{Jumlah Perkara yang Putus 2019}} \times 100\% \end{aligned}$$

$$\text{Persentase Indikator} = \frac{159}{159} \times 100\%$$

$$\text{Persentase Indikator} = 100,00 \%$$

Sehingga untuk indikator ini Realisasi adalah 100,00%, sedangkan target yang ingin dicapai pada Indikator ini adalah 90% sehingga jika dipersentasikan, maka nilai Indikator ini adalah 111,11 % sebagaimana perhitungan di bawah ini:

$$\text{Nilai Indikator} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Nilai Indikator} = \frac{100 \%}{90\%} \times 100\%$$

$$\text{Nilai Indikator} = 111,11 \%$$

h. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi

Selama tahun 2019, Pengadilan Negeri Pulang Pisau menangani Perkara Pidana Khusus anak berjumlah 7 Perkara, dari 7 Perkara tersebut belum ada Perkara yang berhasil dilakukan diversi. Informasi Perkara Pidana Khusus Anak adalah sebagai berikut:

| No | Bulan | Jumlah Perkara | Jumlah yang di Diversi | Berhasil | Gagal |
|----|--------------------|----------------|------------------------|----------|-------|
| 1 | Pidana Khusus Anak | 7 | 0 | 0 | 7 |

Indikator ini diperoleh dari laporan Bulanan yang dapat diungkapkan sebagai berikut:

| Nomor Perkara | Tanggal Pendaftaran | Tanggal Putusan |
|----------------------------|---------------------|-----------------|
| 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pps | 2019-02-20 | 2019-02-28 |
| 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pps | 2019-02-25 | 2019-03-04 |
| 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pps | 2019-03-11 | 2019-03-20 |
| 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pps | 2019-03-14 | 2019-03-20 |
| 6/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pps | 2019-09-04 | 2019-09-09 |
| 5/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pps | 2019-09-03 | 2019-09-20 |
| 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pps | 2019-10-08 | 2019-10-22 |

Sehingga Indikator ini dihitung sebagai berikut:

$$\text{Persentase Indikator} = \frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan dengan Diversi}}{\text{Jumlah Perkara Pidana Khusus Anak yang Putus 2019}} \times 100\%$$

$$\text{Persentase Indikator} = \frac{0}{7} \times 100\%$$

$$\text{Persentase Indikator} = 0\%$$

Sehingga untuk indikator ini Realisasi adalah 0,00%, sedangkan target yang ingin dicapai pada Indikator ini adalah 2 % sehingga jika dipersentasekan, maka nilai Indikator ini adalah 0 % sebagaimana perhitungan di bawah ini:

$$\text{Nilai Indikator} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Nilai Indikator} = \frac{0\%}{2\%} \times 100\%$$

$$\text{Nilai Indikator} = 0\%$$

i. **Index Kepuasan Pencari Keadilan**

Index Kepuasan Pencari Keadilan dievaluasi dan dihitung berdasarkan Hasil Analisa Survey Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan. Responden terdiri dari 90 orang dengan penilaian terhadap 9 Ruang Lingkup Pelayanan yang meliputi:

- Persyaratan
- Prosedur
- Waktu Pelayanan
- Biaya/Tarif
- Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
- Kompetensi Pelaksana

- Perilaku Pelaksana
- Maklumat Pelayanan
- Penanganan Pegaduan, Saran dan Masukan

Hasil analisis terhadap 90 orang responden dengan 9 Kriteria Pelayanan tersebut diperoleh data sebagai berikut:

| No. Resp | NILAI RUANG LINGKUP PELAYANAN | | | | | | | | | Keterangan |
|---------------------------------|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Jumlah | 283 | 278 | 271 | 272 | 286 | 293 | 304 | 271 | 269 | |
| NRR per RL | 3.144 | 3.089 | 3.011 | 3.022 | 3.178 | 3.256 | 3.378 | 3.011 | 2.989 | |
| NRR Tertimbang | 0.349 | 0.343 | 0.335 | 0.336 | 0.353 | 0.362 | 0.375 | 0.335 | 0.332 | 3.120 |
| Index Kepuasan Pencari Keadilan | | | | | | | | | | 77.99 |

Sehingga Nilai Index Kepuasan Pencari Keadilan bernilai 77,99. Sehingga Indikator ini dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned} & \text{Persentase Indikator} \\ & = \frac{\text{Nilai Hasil Survey}}{\text{Nilai Ideal}} \times 100\% \end{aligned}$$

$$\text{Persentase Indikator} = \frac{77,99}{100} \times 100\%$$

$$\text{Persentase Indikator} = 77,99 \%$$

Sehingga untuk indikator ini Realisasi adalah 77,99%, sedangkan target yang ingin dicapai pada Indikator ini adalah 70 % sehingga jika dipersentasekan, maka nilai Indikator ini adalah 111,41 % sebagaimana perhitungan di bawah ini:

$$\text{Nilai Indikator} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Nilai Indikator} = \frac{77,99 \%}{70 \%} \times 100\%$$

$$\text{Nilai Indikator} = 111,41 \%$$

2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

Dalam sasaran peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara ini terdiri dari 4 (empat) indikator utama. Adapun pencapaian realisasi kinerja Pengadilan Negeri Pulang Pisau pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | PERSENTAS E |
|-----|--|--|--------|-----------|-------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 2 | Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara | Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu | 95% | 70,59% | 74,3% |
| | | Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu | 95% | 94,37% | 99,34% |
| | | Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi | 2% | 5,88% | 294,12% |
| | | Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu | 95% | 100% | 105,26% |
| | | Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus | 90% | 100% | 111,41% |

a. **Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu**

Untuk indikator ini maka Cara Pengukurannya adalah dengan membandingkan tenggang Tanggal Putus Perkara dengan Tanggal Pemberitahuan. Adapun Data yang diperoleh dapat diuraikan sebagai berikut:

| No | Nama Perkara | Tanggal Putus | Tanggal Pemberitahuan | Rentang Waktu (Hari) |
|----|----------------------|------------------|-----------------------|----------------------|
| 1 | 1/Pdt.G/2019/PN Pps | 14 Agustus 2019 | 14 Agustus 2019 | 0 |
| 2 | 2/Pdt.G/2019/PN Pps | 23 Mei 2019 | 07 Juni 2019 | 15 |
| 3 | 1/Pdt.P/2019/PN Pps | 25 Februari 2019 | 25 Februari 2019 | 0 |
| 4 | 2/Pdt.P/2019/PN Pps | 20 Maret 2019 | 20 Maret 2019 | 0 |
| 5 | 3/Pdt.P/2019/PN Pps | 14 Maret 2019 | 14 Maret 2019 | 0 |
| 6 | 3/Pdt.G/2019/PN Pps | 16 Mei 2019 | 31 Mei 2019 | 15 |
| 7 | 4/Pdt.G/2019/PN Pps | 09 Oktober 2019 | 24 Oktober 2019 | 15 |
| 8 | 5/Pdt.G/2019/PN Pps | 20 Mei 2019 | 20 Mei 2019 | 0 |
| 9 | 4/Pdt.P/2019/PN Pps | 16 April 2019 | 16 April 2019 | 0 |
| 10 | 6/Pdt.G/2019/PN Pps | 10 Oktober 2019 | 10 Oktober 2019 | 0 |
| 11 | 7/Pdt.G/2019/PN Pps | 27 Mei 2019 | 13 Juni 2019 | 17 |
| 12 | 8/Pdt.G/2019/PN Pps | 27 Mei 2019 | 12 Juni 2019 | 16 |
| 13 | 10/Pdt.G/2019/PN Pps | 25 Juli 2019 | 25 Juli 2019 | 0 |
| 14 | 5/Pdt.P/2019/PN Pps | 27 Agustus 2019 | 27 Agustus 2019 | 0 |
| 15 | 14/Pdt.G/2019/PN Pps | 18 Desember 2019 | 18 Desember 2019 | 0 |
| 16 | 16/Pdt.G/2019/PN Pps | 18 Desember 2019 | 18 Desember 2019 | 0 |
| 17 | 20/Pdt.G/2019/PN Pps | 09 Desember 2019 | 09 Desember 2019 | 0 |

Dari 17 Perkara Perdata yang ditangani selama tahun 2019, 5 Perkara memiliki rentang waktu 15 hari hingga 17 hari sehingga *one days minutes* tidak dapat dilaksanakan untuk 5 Perkara ini.

Nilai Index ini dihitung sebagai berikut:

$$\text{Persentase Indikator} = \frac{\text{Jumlah Perkara Yang Tidak Terlambat Pemberitahuan}}{\text{Jumlah Perkara Perdata Yang ditangani}} \times 100\%$$

$$\text{Persentase Indikator} = \frac{12}{17} \times 100\%$$

$$\text{Persentase Indikator} = 70,59 \%$$

Sehingga untuk indikator ini Realisasi adalah 29,41%, sedangkan target yang ingin dicapai pada Indikator ini adalah 95% % sehingga jika dipersentasekan, maka nilai Indikator ini adalah 70,59 % sebagaimana perhitungan di bawah ini:

$$\text{Nilai Indikator} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Nilai Indikator} = \frac{70,59 \%}{95 \%} \times 100\%$$

$$\text{Nilai Indikator} = 74,30 \%$$

Sumber data yang digunakan adalah Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan serta register perkara.

b) **Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu**

Untuk indikator ini maka Cara Pengukurannya adalah dengan membandingkan tenggang Tanggal Putus Perkara dengan Tanggal Pemberitahuan. Adapun Data yang diperoleh dapat diuraikan sebagai berikut:

| No | Nama Perkara | Tanggal Putus | Tanggal Pemberitahuan | Selisih Waktu |
|----|----------------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| 1 | 10/Pid.B/2018/PN Pps | 2019-01-03 | 2019-01-10 | 7 |
| 2 | 11/Pid.B/2018/PN Pps | 2019-01-03 | 2019-01-10 | 7 |
| 3 | 105/Pid.B/LH/2019/PN Pps | 2019-12-04 | 2019-12-09 | 5 |
| 4 | 113/Pid.B/2019/PN Pps | 2019-12-04 | 2019-12-09 | 5 |
| 5 | 83/Pid.Sus/2019/PN Pps | 2019-10-10 | 2019-10-14 | 4 |
| 6 | 108/Pid.B/2019/PN Pps | 2019-12-05 | 2019-12-09 | 4 |
| 7 | 9/Pid.B/2018/PN Pps | 2019-01-07 | 2019-01-09 | 2 |
| 8 | 1/Pid.Pra/2019/PN Pps | 2019-01-22 | 2019-01-24 | 2 |
| 9 | 79/Pid.B/2019/PN Pps | 2019-10-07 | 2019-10-08 | 1 |
| 10 | 96/Pid.B/2019/PN Pps | 2019-10-28 | 2019-10-29 | 1 |
| 11 | 98/Pid.B/2019/PN Pps | 2019-10-28 | 2019-10-29 | 1 |
| 12 | 101/Pid.Sus/2019/PN Pps | 2019-12-18 | 2019-12-19 | 1 |
| 13 | 110/Pid.Sus/2019/PN Pps | 2019-12-18 | 2019-12-19 | 1 |
| 14 | 1/Pid.B/2019/PN Pps | 2019-02-06 | 2019-02-06 | 0 |
| 15 | 2/Pid.B/2019/PN Pps | 2019-02-06 | 2019-02-06 | 0 |
| 16 | 8/Pid.Sus/2018/PN Pps | 2019-02-27 | 2019-02-27 | 0 |
| 17 | 12/Pid.Sus/2018/PN Pps | 2019-01-17 | 2019-01-17 | 0 |
| 18 | 3/Pid.B/2019/PN Pps | 2019-02-06 | 2019-02-06 | 0 |
| 19 | 13/Pid.B/2018/PN Pps | 2019-01-30 | 2019-01-30 | 0 |
| 20 | 14/Pid.Sus/2018/PN Pps | 2019-02-19 | 2019-02-19 | 0 |
| 21 | 15/Pid.Sus/2018/PN Pps | 2019-02-06 | 2019-02-06 | 0 |
| 22 | 4/Pid.B/2019/PN Pps | 2019-02-06 | 2019-02-06 | 0 |
| 23 | 5/Pid.Sus/2019/PN Pps | 2019-02-06 | 2019-02-06 | 0 |
| 24 | 6/Pid.B/2019/PN Pps | 2019-02-26 | 2019-02-26 | 0 |
| 25 | 7/Pid.B/2019/PN Pps | 2019-02-26 | 2019-02-26 | 0 |
| 26 | 8/Pid.Sus/2019/PN Pps | 2019-02-26 | 2019-02-26 | 0 |
| 27 | 2/Pid.Pra/2019/PN Pps | 2019-02-12 | 2019-02-12 | 0 |
| 28 | 9/Pid.B/2019/PN Pps | 2019-02-19 | 2019-02-19 | 0 |
| 29 | 10/Pid.Sus/2019/PN Pps | 2019-04-04 | 2019-04-04 | 0 |
| 30 | 11/Pid.Sus/2019/PN Pps | 2019-03-05 | 2019-03-05 | 0 |
| 31 | 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pps | 2019-02-28 | 2019-02-28 | 0 |
| 32 | 12/Pid.Sus/2019/PN Pps | 2019-03-14 | 2019-03-14 | 0 |

| | | | | |
|----|----------------------------|------------|------------|---|
| 33 | 13/Pid.B/2019/PN Pps | 2019-04-02 | 2019-04-02 | 0 |
| 34 | 14/Pid.B/2019/PN Pps | 2019-04-11 | 2019-04-11 | 0 |
| 35 | 15/Pid.Sus/2019/PN Pps | 2019-03-27 | 2019-03-27 | 0 |
| 36 | 16/Pid.B/2019/PN Pps | 2019-04-02 | 2019-04-02 | 0 |
| 37 | 17/Pid.Sus/2019/PN Pps | 2019-03-27 | 2019-03-27 | 0 |
| 38 | 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pps | 2019-03-04 | 2019-03-04 | 0 |
| 39 | 18/Pid.B/2019/PN Pps | 2019-04-02 | 2019-04-02 | 0 |
| 40 | 19/Pid.B/2019/PN Pps | 2019-04-02 | 2019-04-02 | 0 |
| 41 | 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pps | 2019-03-20 | 2019-03-20 | 0 |
| 42 | 20/Pid.Sus/2019/PN Pps | 2019-03-27 | 2019-03-27 | 0 |
| 43 | 21/Pid.B/2019/PN Pps | 2019-04-09 | 2019-04-09 | 0 |
| 44 | 22/Pid.B/2019/PN Pps | 2019-04-09 | 2019-04-09 | 0 |
| 45 | 23/Pid.B/2019/PN Pps | 2019-03-27 | 2019-03-27 | 0 |
| 46 | 24/Pid.B/2019/PN Pps | 2019-03-27 | 2019-03-27 | 0 |
| 47 | 25/Pid.B/2019/PN Pps | 2019-05-29 | 2019-05-29 | 0 |
| 48 | 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pps | 2019-03-20 | 2019-03-20 | 0 |
| 49 | 26/Pid.B/2019/PN Pps | 2019-03-27 | 2019-03-27 | 0 |
| 50 | 27/Pid.Sus/2019/PN Pps | 2019-05-29 | 2019-05-29 | 0 |
| 51 | 28/Pid.B/2019/PN Pps | 2019-10-17 | 2019-10-17 | 0 |
| 52 | 29/Pid.Sus/2019/PN Pps | 2019-05-09 | 2019-05-09 | 0 |
| 53 | 30/Pid.Sus/2019/PN Pps | 2019-04-09 | 2019-04-09 | 0 |
| 54 | 31/Pid.B/2019/PN Pps | 2019-04-16 | 2019-04-16 | 0 |
| 55 | 32/Pid.B/2019/PN Pps | 2019-05-21 | 2019-05-21 | 0 |
| 56 | 33/Pid.B/2019/PN Pps | 2019-04-11 | 2019-04-11 | 0 |
| 57 | 34/Pid.B/2019/PN Pps | 2019-05-21 | 2019-05-21 | 0 |
| 58 | 35/Pid.Sus/2019/PN Pps | 2019-05-09 | 2019-05-09 | 0 |
| 59 | 36/Pid.B/2019/PN Pps | 2019-04-11 | 2019-04-11 | 0 |
| 60 | 37/Pid.Sus/2019/PN Pps | 2019-05-09 | 2019-05-09 | 0 |
| 61 | 38/Pid.Sus/2019/PN Pps | 2019-04-16 | 2019-04-16 | 0 |
| 62 | 39/Pid.Sus/2019/PN Pps | 2019-05-15 | 2019-05-15 | 0 |
| 63 | 40/Pid.Sus/2019/PN Pps | 2019-07-23 | 2019-07-23 | 0 |
| 64 | 41/Pid.Sus/2019/PN Pps | 2019-07-10 | 2019-07-10 | 0 |
| 65 | 42/Pid.Sus/2019/PN Pps | 2019-05-29 | 2019-05-29 | 0 |
| 66 | 43/Pid.Sus/2019/PN Pps | 2019-05-29 | 2019-05-29 | 0 |
| 67 | 44/Pid.B/2019/PN Pps | 2019-05-21 | 2019-05-21 | 0 |
| 68 | 45/Pid.B/2019/PN Pps | 2019-05-23 | 2019-05-23 | 0 |
| 69 | 46/Pid.Sus/2019/PN Pps | 2019-05-29 | 2019-05-29 | 0 |
| 70 | 47/Pid.Sus/2019/PN Pps | 2019-08-06 | 2019-08-06 | 0 |
| 71 | 48/Pid.Sus/2019/PN Pps | 2019-05-29 | 2019-05-29 | 0 |
| 72 | 49/Pid.B/LH/2019/PN Pps | 2019-05-27 | 2019-05-27 | 0 |
| 73 | 50/Pid.B/2019/PN Pps | 2019-06-11 | 2019-06-11 | 0 |
| 74 | 51/Pid.B/2019/PN Pps | 2019-05-29 | 2019-05-29 | 0 |
| 75 | 52/Pid.B/LH/2019/PN Pps | 2019-06-20 | 2019-06-20 | 0 |
| 76 | 53/Pid.Sus/2019/PN Pps | 2019-07-24 | 2019-07-24 | 0 |
| 77 | 54/Pid.Sus/2019/PN Pps | 2019-05-29 | 2019-05-29 | 0 |
| 78 | 55/Pid.B/2019/PN Pps | 2019-05-29 | 2019-05-29 | 0 |

| | | | | |
|-----|----------------------------|------------|------------|---|
| 79 | 56/Pid.Sus/2019/PN Pps | 2019-07-10 | 2019-07-10 | 0 |
| 80 | 57/Pid.B/2019/PN Pps | 2019-05-29 | 2019-05-29 | 0 |
| 81 | 58/Pid.B/2019/PN Pps | 2019-06-25 | 2019-06-25 | 0 |
| 82 | 59/Pid.B/2019/PN Pps | 2019-07-04 | 2019-07-04 | 0 |
| 83 | 60/Pid.B/2019/PN Pps | 2019-06-19 | 2019-06-19 | 0 |
| 84 | 61/Pid.Sus/2019/PN Pps | 2019-06-18 | 2019-06-18 | 0 |
| 85 | 62/Pid.Sus/2019/PN Pps | 2019-06-19 | 2019-06-19 | 0 |
| 86 | 63/Pid.Sus/2019/PN Pps | 2019-06-25 | 2019-06-25 | 0 |
| 87 | 64/Pid.Sus/2019/PN Pps | 2019-07-11 | 2019-07-11 | 0 |
| 88 | 65/Pid.B/2019/PN Pps | 2019-06-18 | 2019-06-18 | 0 |
| 89 | 66/Pid.B/2019/PN Pps | 2019-06-18 | 2019-06-18 | 0 |
| 90 | 67/Pid.Sus/2019/PN Pps | 2019-06-19 | 2019-06-19 | 0 |
| 91 | 68/Pid.Sus/2019/PN Pps | 2019-06-19 | 2019-06-19 | 0 |
| 92 | 69/Pid.B/2019/PN Pps | 2019-06-19 | 2019-06-19 | 0 |
| 93 | 70/Pid.B/2019/PN Pps | 2019-07-09 | 2019-07-09 | 0 |
| 94 | 71/Pid.B/2019/PN Pps | 2019-08-21 | 2019-08-21 | 0 |
| 95 | 72/Pid.Sus/2019/PN Pps | 2019-07-23 | 2019-07-23 | 0 |
| 96 | 73/Pid.Sus/2019/PN Pps | 2019-08-14 | 2019-08-14 | 0 |
| 97 | 74/Pid.Sus/2019/PN Pps | 2019-08-15 | 2019-08-15 | 0 |
| 98 | 75/Pid.Sus/2019/PN Pps | 2019-08-15 | 2019-08-15 | 0 |
| 99 | 76/Pid.Sus/2019/PN Pps | 2019-08-15 | 2019-08-15 | 0 |
| 100 | 77/Pid.Sus/2019/PN Pps | 2019-08-15 | 2019-08-15 | 0 |
| 101 | 78/Pid.Sus/2019/PN Pps | 2019-08-15 | 2019-08-15 | 0 |
| 102 | 80/Pid.B/2019/PN Pps | 2019-08-22 | 2019-08-22 | 0 |
| 103 | 1/Pid.C/2019/PN Pps | 2019-08-05 | 2019-08-05 | 0 |
| 104 | 81/Pid.B/2019/PN Pps | 2019-08-28 | 2019-08-28 | 0 |
| 105 | 82/Pid.B/2019/PN Pps | 2019-10-10 | 2019-10-10 | 0 |
| 106 | 84/Pid.Sus/2019/PN Pps | 2019-10-10 | 2019-10-10 | 0 |
| 107 | 85/Pid.B/2019/PN Pps | 2019-08-29 | 2019-08-29 | 0 |
| 108 | 3/Pid.Pra/2019/PN Pps | 2019-08-22 | 2019-08-22 | 0 |
| 109 | 86/Pid.Sus/2019/PN Pps | 2019-10-16 | 2019-10-16 | 0 |
| 110 | 87/Pid.Sus/2019/PN Pps | 2019-10-24 | 2019-10-24 | 0 |
| 111 | 88/Pid.Sus/2019/PN Pps | 2019-11-06 | 2019-11-06 | 0 |
| 112 | 2/Pid.C/2019/PN Pps | 2019-08-29 | 2019-08-29 | 0 |
| 113 | 3/Pid.C/2019/PN Pps | 2019-08-29 | 2019-08-29 | 0 |
| 114 | 4/Pid.C/2019/PN Pps | 2019-08-29 | 2019-08-29 | 0 |
| 115 | 5/Pid.C/2019/PN Pps | 2019-08-29 | 2019-08-29 | 0 |
| 116 | 6/Pid.C/2019/PN Pps | 2019-08-29 | 2019-08-29 | 0 |
| 117 | 7/Pid.C/2019/PN Pps | 2019-08-29 | 2019-08-29 | 0 |
| 118 | 89/Pid.B/2019/PN Pps | 2019-10-10 | 2019-10-10 | 0 |
| 119 | 90/Pid.B/2019/PN Pps | 2019-10-10 | 2019-10-10 | 0 |
| 120 | 5/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pps | 2019-09-20 | 2019-09-20 | 0 |
| 121 | 91/Pid.B/LH/2019/PN Pps | 2019-10-10 | 2019-10-10 | 0 |
| 122 | 92/Pid.B/2019/PN Pps | 2019-10-24 | 2019-10-24 | 0 |
| 123 | 93/Pid.Sus/2019/PN Pps | 2019-11-06 | 2019-11-06 | 0 |
| 124 | 6/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pps | 2019-09-09 | 2019-09-09 | 0 |

| | | | | |
|-----|----------------------------|------------|------------|---|
| 125 | 94/Pid.B/2019/PN Pps | 2019-10-02 | 2019-10-02 | 0 |
| 126 | 95/Pid.B/2019/PN Pps | 2019-10-24 | 2019-10-24 | 0 |
| 127 | 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pps | 2019-10-22 | 2019-10-22 | 0 |
| 128 | 97/Pid.B/2019/PN Pps | 2019-12-11 | 2019-12-11 | 0 |
| 129 | 99/Pid.B/2019/PN Pps | 2019-12-11 | 2019-12-11 | 0 |
| 130 | 100/Pid.B/2019/PN Pps | 2019-11-21 | 2019-11-21 | 0 |
| 131 | 102/Pid.B/2019/PN Pps | 2019-10-28 | 2019-10-28 | 0 |
| 132 | 103/Pid.B/2019/PN Pps | 2019-12-18 | 2019-12-18 | 0 |
| 133 | 104/Pid.B/2019/PN Pps | 2019-10-30 | 2019-10-30 | 0 |
| 134 | 106/Pid.Sus/2019/PN Pps | 2019-11-13 | 2019-11-13 | 0 |
| 135 | 107/Pid.B/2019/PN Pps | 2019-12-18 | 2019-12-18 | 0 |
| 136 | 109/Pid.B/LH/2019/PN Pps | 2019-12-30 | 2019-12-30 | 0 |
| 137 | 111/Pid.B/2019/PN Pps | 2019-12-04 | 2019-12-04 | 0 |
| 138 | 112/Pid.B/2019/PN Pps | 2019-12-18 | 2019-12-18 | 0 |
| 139 | 115/Pid.Sus/2019/PN Pps | 2019-12-23 | 2019-12-23 | 0 |
| 140 | 116/Pid.B/2019/PN Pps | 2019-12-23 | 2019-12-23 | 0 |
| 141 | 117/Pid.B/2019/PN Pps | 2019-12-18 | 2019-12-18 | 0 |
| 142 | 8/Pid.C/2019/PN Pps | 2019-12-12 | 2019-12-12 | 0 |

Dari 142 Perkara Perdata yang ditangani selama tahun 2019, 8 Perkara memiliki rentang waktu melebihi 1 hari sehingga **one days minutes** tidak dapat dilaksanakan untuk 8 Perkara ini.

Nilai Index ini dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned} & \text{Persentase Indikator} \\ &= \frac{\text{Jumlah Perkara Yang Tidak Terlambat Pemberitahuan}}{\text{Jumlah Perkara Perdata Yang ditangani}} \times 100\% \end{aligned}$$

$$\text{Persentase Indikator} = \frac{134}{142} \times 100\%$$

$$\text{Persentase Indikator} = 94,37\%$$

Sehingga untuk indikator ini Realisasi adalah 94,37%, sedangkan target yang ingin dicapai pada Indikator ini adalah 95% % sehingga jika dipersentasekan, maka nilai Indikator ini adalah 99,34 % sebagaimana perhitungan di bawah ini:

$$\text{Nilai Indikator} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Nilai Indikator} = \frac{94,37\%}{95\%} \times 100\%$$

$$\text{Nilai Indikator} = 99,34\%$$

Sumber data yang digunakan adalah Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan serta register perkara.

c) Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi

Jumlah Perkara Perdata yang putus selama tahun 2019 berjumlah 17 Perkara Perdata. Dari 17 Perkara Perdata tersebut 1 Perkara berhasil diselesaikan melalui Proses Mediasi yaitu perkara Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Pps.

Sehingga Nilai Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned} & \text{Persentase Indikator} \\ & = \frac{\text{Perkara Perdata Yang Mediasi Berhasil}}{\text{Jumlah Perkara Perdata Tahun 2019}} \times 100\% \end{aligned}$$

$$\text{Persentase Indikator} = \frac{1}{17} \times 100\%$$

$$\text{Persentase Indikator} = 5,88 \%$$

Sehingga untuk indikator ini Realisasi adalah 5,88%, sedangkan target yang ingin dicapai pada Indikator ini adalah 2 % sehingga jika dipersentasekan, maka nilai Indikator ini adalah 294,12 % sebagaimana perhitungan di bawah ini:

$$\text{Nilai Indikator} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Nilai Indikator} = \frac{5,88 \%}{2 \%} \times 100\%$$

$$\text{Nilai Indikator} = 294,12 \%$$

Sumber data yang digunakan adalah Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.

d) Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi, dan PK secara lengkap dan tepat waktu

Perkara yang menyatakan Banding selama tahun 2019 berjumlah 9 Perkara, terdiri dari 8 Perkara Pidana dan 1 Perkara Perdata. Pengiriman Berkas dianggap tepat dan lengkap jika tenggang waktu Pengiriman adalah 14 Hari sejak para pihak menyatakan Banding pada perkara Pidana dan 30 hari pada Perkara Perdata. Analisis ini diuraikan sebagai berikut:

| No | Nama Perkara | Tanggal Menyatakan Banding | Tanggal Pengiriman Berkas ke PT | Selisih Waktu | Tenggang Waktu Maksimal | Keterangan |
|----|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------|-------------------------|-------------|
| 1 | 1/Pdt.G/2019/P N Pps | 2019-09-04 | 2019-09-26 | 22 | 30 | Tepat Waktu |
| 2 | 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pps | 2019-03-29 | 2019-04-09 | 11 | 14 | Tepat Waktu |
| 3 | 28/Pid.B/2019/PN Pps | 2019-10-22 | 2019-11-04 | 13 | 14 | Tepat Waktu |
| 4 | 47/Pid.Sus/2019/PN Pps | 2019-08-13 | 2019-08-26 | 13 | 14 | Tepat Waktu |
| 5 | 48/Pid.Sus/2019/PN Pps | 2019-05-31 | 2019-06-11 | 11 | 14 | Tepat Waktu |
| 6 | 73/Pid.Sus/2019/PN Pps | 2019-08-20 | 2019-09-02 | 12 | 14 | Tepat Waktu |
| 7 | 79/Pid.B/2019/PN Pps | 2019-10-14 | 2019-10-28 | 14 | 14 | Tepat Waktu |
| 8 | 107/Pid.B/2019/PN Pps | 2019-12-30 | 2020-01-06 | 7 | 14 | Tepat Waktu |
| 9 | 115/Pid.Sus/2019/PN Pps | 2019-12-23 | 2020-01-06 | 14 | 14 | Tepat Waktu |

Perkara yang menyatakan Kasasi selama tahun 2019 berjumlah 1 Perkara, yang merupakan perkara Pidana. Pengiriman Berkas dianggap tepat dan lengkap jika tenggang waktu Pengiriman adalah 30 Hari sejak para pihak menyatakan Banding pada untuk perkara Pidana. Analisis ini diuraikan sebagai berikut:

| No | Nama Perkara | Tanggal Menyatakan Kasasi | Tanggal Pengiriman Berkas ke MARI | Selisih Waktu | Tenggang Waktu Maksimal | Keterangan |
|----|---------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------|-------------------------|-------------|
| 1 | 5/Pid.B/2018/PN Pps | 2019-02-18 | 2019-03-15 | 25 | 30 | Tepat Waktu |

Untuk Perkara PK selama tahun 2019 adalah Nihil.

Untuk indikator Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi, dan PK secara lengkap dan tepat waktu ditetapkan target sebesar 95%. Perhitungan Indikator ini adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} & \textit{Persentase Indikator} \\ & = \frac{\text{Jumlah Perkara yang dikirim tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara Banding, Kasasi dan PK}} \times 100\% \end{aligned}$$

$$\textit{Persentase Indikator} = \frac{10}{10} \times 100\%$$

$$\textit{Persentase Indikator} = 100 \%$$

Sehingga untuk indikator ini Realisasi adalah 100%, sedangkan target yang ingin dicapai pada Indikator ini adalah 95 % sehingga jika dipersentasekan, maka nilai Indikator ini adalah 294,12 % sebagaimana perhitungan di bawah ini:

$$\textit{Nilai Indikator} = = \frac{\textit{Realisasi}}{\textit{Target}} \times 100\%$$

$$\textit{Nilai Indikator} = \frac{100 \ %}{95 \ \%} \times 100\%$$

$$\textit{Nilai Indikator} = 105,26 \ \%$$

Sumber data yang digunakan adalah Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.

e) **Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus**

Untuk indikator persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus ditetapkan target sebesar 90 % dan realisasinya mencapai 100%, hal ini dikarenakan selama tahun 2019 tidak ada Perkara yang dianggap cukup menarik perhatian pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau.

Sumber data yang digunakan adalah Laporan bulanan, Laporan tahunan dan SIPP.

3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

Dalam sasaran Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan terdiri dari 3 (tiga) indikator kinerja utama yaitu :

- 1). Persentase perkara prodeo yang diselesaikan;
- 2). Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan;
- 3). Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum);

Pada Tahun 2019 Realisasi pencapaiannya dapat digambarkan sebagai berikut :

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | PERSENTASE |
|-----|---|--|--------|-----------|------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 3 | Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan | Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) | 5% | 0% | 0% |

a. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)

Posbakum (Pos bantuan Hukum) adalah salah satu program unggulan Mahkamah Agung untuk meningkatkan akses peradilan pada masyarakat.

Di Pengadilan Negeri Pulang Pisau dalam pelaksanaan posbakum bekerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum PERADI.

Untuk tahun 2019 dalam indikator kinerja ini ditetapkan target 20% dan dalam realisasinya tidak ada satupun hasil Konsultasi yang menjadi perkara.

Sumber Laporan Kepaniteraan Hukum.

4. Meningkatkan kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan

Dalam sasaran meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan terdiri atas 1 (satu) indikator kinerja utama yakni persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi). Pencapaian target kinerja Pengadilan Negeri Pulang Pisau tahun 2019 adalah sebagai berikut:

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | PERSENTASE |
|-----|---|--|--------|-----------|------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 4 | Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan | Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak | 90% | 100% | 111,41% |

| | | | | | |
|--|------------|----------------------|--|--|--|
| | Pengadilan | lanjuti (Dieksekusi) | | | |
|--|------------|----------------------|--|--|--|

a. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

Untuk indikator persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) ditetapkan target 90% dan realisasinya mencapai 100%, hal ini dikarenakan tidak adanya eksekusi dikarenakan para pihak setelah menerima putusan dan menerima putusan itu tanpa proses eksekusi. Sumber data adalah laporan bulanan, laporan tahunan dan buku register.

A.2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja tahun 2019 dengan Realisasi Tahun sebelumnya.

Dalam menghitung perbandingan realisasi kinerja tahun 2019 dengan tahun sebelumnya (2016) digunakanlah indikator kinerja utama tahun sebelumnya, yang mana hasilnya dapat digambarkan sebagai berikut :

PENGUKURAN KINERJA

Unit Organisasi : PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU

Tahun Anggaran : 2019 dan 2018

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TAR-GET | REALI-SASI | PERSEN-TASE | TAR-GET | REALI-SASI | PERSEN-TASE |
|-----|--|--|------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|
| | | | Tahun 2018 | | | Tahun 2019 | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel | Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan | 100% | - | - | 100% | 100% | 100% |
| | | Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 93,33% |
| | | Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu | 95% | - | - | 95% | 82,35% | 86,68% |
| | | Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu | 95% | 100% | 105,26% | 95% | 99,30% | 104,53% |
| | | Persentase Perkara yang | 70% | 100% | 142,86% | 70% | 93,33% | 103,33% |

| | | | | | | | | |
|---|--|--|-----|--------|---------|-----|--------|----------|
| | | Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding | | | | | | |
| | | Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi | 80% | 100% | 125% | 80% | 98,11% | 122,64% |
| | | Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali | 90% | 100% | 111,11% | 90% | 100% | 111,11% |
| | | Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi | 2% | - | - | 2% | 0% | 0% |
| | | Index Kepuasan Pencari Keadilan | 70% | - | - | 70% | 77,99% | 111,41 % |
| 2 | Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara | Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu | 95% | - | - | 95% | 70,59% | 74,3% |
| | | Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu | 95% | 88,89% | 93,57% | 95% | 94,37% | 99,34% |
| | | Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi | 2% | 0% | 0% | 2% | 5,88% | 294,12% |
| | | Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu | 90% | 100% | 111,11% | 95% | 100% | 105,26% |

| | | | | | | | | |
|---|---|--|-----|------|---------|-----|------|---------|
| | | Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus | 90% | 100% | 111,11% | 90% | 100% | 111,11% |
| 3 | Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan | Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum) | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% |
| 4 | Meningkatnya kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan | Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) | 90% | 100% | 111,41% | 90% | 100% | 111,41% |

Dari gambaran pencapaian diatas dapat dilihat bahwa secara umum terdapat peningkatan realisasi kinerja pada tahun 2019 dibandingkan tahun 2018 walaupun ada beberapa indikator yang menurun.

Peningkatan tersebut dapat dilihat dari segi Kuantitas maupun Kualitasnya. Peningkatan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TAR-GET | REALI-SASI | PERSEN-TASE | TAR-GET | REALI-SASI | PERSEN-TASE |
|-----|--|---|------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|
| | | | Tahun 2018 | | | Tahun 2019 | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel | Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan | 100% | - | - | 100% | 100% | 100% |
| | | Persentase Sisa Perkara | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 93,33% |

| | | | | | | | |
|--|---|-----|------|---------|-----|--------|----------|
| | Pidana yang Diselesaikan | | | | | | |
| | Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu | 95% | - | - | 95% | 82,35% | 86,68% |
| | Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu | 95% | 100% | 105,26% | 95% | 99,30% | 104,53% |
| | Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding | 70% | 100% | 142,86% | 70% | 93,33% | 103,33% |
| | Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi | 80% | 100% | 125% | 80% | 98,11% | 122,64% |
| | Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali | 90% | 100% | 111,11% | 90% | 100% | 111,11% |
| | Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi | 2% | - | - | 2% | 0% | 0% |
| | Index Kepuasan Pencari Keadilan | 70% | - | - | 70% | 77,99% | 111,41 % |

a. Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan

Pengadilan Negeri Pulang Pisau beroperasi pada 01 Nopember 2018, sehingga tidak ada Perkara tahun lalu atau Perkara pada Tahun 2017. Selain itu selama tahun 2018 belum ada Perkara Perdata yang masuk, mengingat hingga sejak berdirinya Pengadilan Negeri Pulang Pisau hingga 31 Desember 2018 hanya berkisar waktu 2 bulan.

Sehingga untuk Indikator ini tidak adanya kenaikan atau penurunan nilai.

b. Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan

Pengadilan Negeri Pulang Pisau beroperasi pada 01 Nopember 2018, sehingga tidak ada Perkara tahun lalu atau Perkara pada Tahun 2017.

c. Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu

Selama tahun 2018, belum ada perkara perdata yang masuk, sehingga Indikator tahun 2018 tidak bisa dihitung dan didefinisikan.

d. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu

Selama tahun 2018, jumlah perkara Pidana yang Putus berjumlah 9 Perkara dan semuanya diputus dengan kurang dari 5 Bulan. Sehingga Indikator Perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2018 bernilai 100%, sedangkan target yang diharapkan adalah 95%, sehingga persentasenya adalah 105,26%.

Jika dibandingkan Indikator ini dengan Indikator pada tahun 2019, maka Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2019 mengalami penurunan persentase dari 105,26% menjadi 104,53%.

Penurunan ini disebabkan pada tahun 2018, hanya 9 perkara Pidana yang masih ditangani dalam rentang waktu Nopember 2018 sd Desember 2018, sedang pada tahun 2019 Jumlah Perkara Pidana yang diselesaikan adalah 142 Perkara.

e. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

Selama tahun 2018, Tidak ada perkara yang mengajukan Upaya Hukum Banding. Sehingga Indikator Perkara Tidak mengajukan Upaya Hukum Banding pada tahun 2018 bernilai 100%, sedangkan target yang diharapkan adalah 70%, sehingga persentasenya adalah 142,86%.

Jika dibandingkan Indikator ini dengan Indikator pada tahun 2019, maka Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding mengalami penurunan persentase dari 142,86% menjadi 103,33%.

Penurunan ini disebabkan pada tahun 2018, hanya 9 perkara yang masih ditangani dalam rentang waktu Nopember 2018 sd Desember 2018. Dari 9 Perkara itu masih tidak ada yang Mengajukan Kasasi, sedang pada tahun 2019 Jumlah Perkara yang mengajukan Upaya Hukum Kasasi ada 3 Perkara, 1 Perkara Perdata dan 1 Perkara adalah Perkara Pidana.

f. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Selama tahun 2018, Tidak ada perkara yang mengajukan Upaya Hukum Kasasi. Sehingga Indikator Perkara Tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi pada tahun 2018 bernilai 100%, sedangkan target yang diharapkan adalah 80%, sehingga persentasenya adalah 125 %.

Jika dibandingkan Indikator ini dengan Indikator pada tahun 2019, maka Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi mengalami penurunan persentase dari 125% menjadi 122,64%.

Penurunan ini disebabkan pada tahun 2018, hanya 9 perkara Pidana yang masih ditangani dalam rentang waktu Nopember 2018 sd Desember 2018. Dari 9 Perkara itu masih tidak ada yang Mengajukan KJasasi, sedang pada tahun 2019 Jumlah Perkara yang mengajukan Upaya Hukum Kasasi ada 3 Perkara, 1 Perkara Perdata dan 2 Perkara adalah Perkara Pidana.

g. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali

Selama tahun 2018, Tidak ada perkara yang mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali. Sehingga Indikator Perkara Tidak mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali pada tahun 2018 bernilai 100%, sedangkan target yang diharapkan adalah 90%, sehingga persentasenya adalah 111,11%.

Jika dibandingkan Indikator ini dengan Indikator pada tahun 2019, maka Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali adalah tetap yaitu 111,11% baik pada tahun 2018, maupun tahun 2019.

h. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi

Perkara Pidana Anak yang masuk selama tahun 2018 hanya masuk 2 perkara, sedangkan tahun 2019 masuk 7 perkara. Dari Perkara yang masuk tersebut, tidak ada Perkara Pidana Anak yang berhasil diselesaikan melalui Diversi. target yang ingin dicapai dari Indikator ini adalah 2% , namun selama tahun 2018 maupun 2019 masih belum tercapai.

i. Index Kepuasan Pencari Keadilan

Index Kepuasan Pencari Keadilan dievaluasi per 6 Bulan sekali, sehingga tahun 2018 belum ada evaluasi Terhadap Index Kepuasan Pencari Keadilan. Sedangkan pada tahun 2019 Target yang ingin dicapai adalah 70%, dengan Realisasi Sehingga Nilai Index Kepuasan Pencari Keadilan bernilai 77,99. Sehingga Persentase Index Kepuasan Pencari Keadilan sudah mencapai target dengan persentase 111,41 %.

2. Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TAR-GET | REALI-SASI | PERSEN-TASE | TAR-GET | REALI-SASI | PERSEN-TASE |
|-----|--|--|------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|
| | | | Tahun 2018 | | | Tahun 2019 | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (4) | (5) | (6) |
| 2 | Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara | Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu | 95% | - | - | 95% | 70,59% | 74,3% |
| | | Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu | 95% | 88,89% | 93,57% | 95% | 94,37% | 99,34% |
| | | Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi | 2% | 0% | 0% | 2% | 5,88% | 294,12% |
| | | Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu | 90% | 100% | 111,11% | 95% | 100% | 105,26% |
| | | Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat | 90% | 100% | 111,11% | 90% | 100% | 111,11% |

| | | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|--|--|
| | | yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|--|--|

a. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu

Dari 17 Perkara Perdata yang ditangani selama tahun 2019, 5 Perkara memiliki rentang waktu 15 hari hingga 17 hari sehingga *one days minutes* tidak dapat dilaksanakan untuk 5 Perkara ini. Dari uraian sebelumnya bahwa Nilai Indikator tahun 2019 adalah 70,59% dari target yang ingin dicapai yaitu 95%. Sedangkan pada tahun 2018 karena tidak adanya Perkara Perdata yang masuk, maka untuk tahun 2018 tidak ada realisasi terhadap Indikator ini.

b. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu

Dari 142 Perkara Perdata yang ditangani selama tahun 2019, 8 Perkara memiliki rentang waktu melebihi 1 hari sehingga *one days minutes* tidak dapat dilaksanakan untuk 8 Perkara ini.

Nilai Index ini dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned} & \text{Persentase Indikator} \\ & = \frac{\text{Jumlah Perkara Yang Tidak Terlambat Pemberitahuan}}{\text{Jumlah Perkara Perdata Yang ditangani}} \times 100\% \end{aligned}$$

$$\text{Persentase Indikator} = \frac{134}{142} \times 100\%$$

$$\text{Persentase Indikator} = 94,37 \%$$

Sehingga untuk indikator ini Realisasi adalah 94,37%, sedangkan target yang ingin dicapai pada Indikator ini adalah 95% % sehingga jika dipersentasekan, maka nilai Indikator ini adalah 99,34 % sebagaimana perhitungan di bawah ini:

$$\text{Nilai Indikator} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Nilai Indikator} = \frac{94,37 \%}{95 \%} \times 100\%$$

$$\text{Nilai Indikator} = 99,34 \%$$

Sedangkan untuk tahun 2019, dari 9 perkara Pidana yang masuk, 8 Perkara diselesaikan tepat waktu sedangkan 1 perkara tidak diselesaikan tepat waktu sebagaimana yang diuraikan di bawah ini:

| Nomor Perkara | Tanggal Putusan | Tanggal Minutasi | Rentang |
|----------------------------|-----------------|------------------|---------|
| 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN Pps | 2018-11-26 | 2018-12-03 | 8 Hari |
| 2/Pid.Sus-Anak/2018/PN Pps | 2018-12-04 | 2018-12-04 | 0 Hari |
| 1/Pid.Sus/2018/PN Pps | 2018-12-06 | 2018-12-06 | 0 Hari |
| 2/Pid.B/2018/PN Pps | 2018-12-06 | 2018-12-06 | 0 Hari |
| 3/Pid.Sus/2018/PN Pps | 2018-12-06 | 2018-12-06 | 0 Hari |
| 4/Pid.B/2018/PN Pps | 2018-12-06 | 2018-12-06 | 0 Hari |
| 5/Pid.B/2018/PN Pps | 2018-12-06 | 2018-12-06 | 0 Hari |
| 7/Pid.B/2018/PN Pps | 2018-12-06 | 2018-12-06 | 0 Hari |
| 6/Pid.Sus/2018/PN Pps | 2018-12-19 | 2018-12-19 | 0 Hari |

Sehingga Nilai Index tahun 2018 ini dihitung sebagai berikut:

$$\text{Persentase Indikator} = \frac{\text{Jumlah Perkara Yang Tidak Terlambat Pemberitahuan}}{\text{Jumlah Perkara Perdata Yang ditangani}} \times 100\%$$

$$\text{Persentase Indikator} = \frac{8}{9} \times 100\%$$

$$\text{Persentase Indikator} = 88,89 \%$$

Sehingga untuk indikator ini Realisasi adalah 88,89%, sedangkan target yang ingin dicapai pada Indikator ini adalah 95% % sehingga jika dipersentasekan, maka nilai Indikator ini adalah 93,57 % sebagaimana perhitungan di bawah ini:

$$\text{Nilai Indikator} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Nilai Indikator} = \frac{88,89 \%}{95 \%} \times 100\%$$

$$\text{Nilai Indikator} = 93,57 \%$$

Sehingga selama tahun 2019 telah terjadi peningkatan Kinerja pada indikator ini dari 93,57% pada tahun 2018 menjadi 99,34% atau mengalami kenaikan 5.77%.

c. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi

Selama tahun 2019, 1 Perkara berhasil diselesaikan melalui Proses Mediasi dari 17 Perkara Perdata yang masuk, yaitu perkara Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Pps.

Sehingga Nilai Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi adalah 5,88%, sedangkan target yang ingin dicapai pada Indikator ini adalah 2 % sehingga jika dipersentasekan, maka nilai Indikator ini adalah 294,12 %. Hal ini mengalami kenaikan dari Periode tahun 2018.

Hal ini disebabkan tidak adanya perkara Perdata yang masuk selama tahun 2018, sehingga indikator ini adalah 0. Sehingga selama tahun 2019 telah terjadi kenaikan Indikator ini sebesar 294,12%.

d. Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu

Tahun 2018 Perkara yang dimohonkan banding berjumlah 2 Perkara, sedangkan Kasasi dan Peninjauan Kembali nihil.

| No | Nama Perkara | Tanggal Menyatakan Banding | Tanggal Pengiriman Berkas ke PT | Selisi h Waktu | Tenggang Waktu Maksimal | Keterangan |
|----|----------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------|-------------------------|-------------|
| 1 | 5/Pid.B/2018/P N Pps | 2018-12-11 | 2018-12-21 | 10 | 14 | Tepat Waktu |
| 2 | 7/Pid.B/2018/P N Pps | 2018-12-11 | 2018-12-21 | 10 | 14 | Tepat Waktu |

Sedangkan perkara yang menyatakan Banding selama tahun 2019 berjumlah 9 Perkara, terdiri dari 8 Perkara Pidana dan 1 Perkara Perdata. Sedangkan Kasasi selama tahun 2019 berjumlah 1 Perkara, dan Tidak ada Perkara yang Peninjauan Kembali.

| No | Nama Perkara | Tanggal Menyatakan Banding | Tanggal Pengiriman Berkas ke PT | Selisi h Waktu | Tenggang Waktu Maksimal | Keterangan |
|----|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------|-------------------------|-------------|
| 1 | 1/Pdt.G/2019/PN Pps | 2019-09-04 | 2019-09-26 | 22 | 30 | Tepat Waktu |
| 2 | 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pps | 2019-03-29 | 2019-04-09 | 11 | 14 | Tepat Waktu |
| 3 | 28/Pid.B/2019/PN Pps | 2019-10-22 | 2019-11-04 | 13 | 14 | Tepat Waktu |
| 4 | 47/Pid.Sus/2019/PN Pps | 2019-08-13 | 2019-08-26 | 13 | 14 | Tepat Waktu |
| 5 | 48/Pid.Sus/2019/PN Pps | 2019-05-31 | 2019-06-11 | 11 | 14 | Tepat Waktu |
| 6 | 73/Pid.Sus/2019/PN Pps | 2019-08-20 | 2019-09-02 | 12 | 14 | Tepat Waktu |
| 7 | 79/Pid.B/2019/PN Pps | 2019-10-14 | 2019-10-28 | 14 | 14 | Tepat Waktu |
| 8 | 107/Pid.B/2019/PN Pps | 2019-12-30 | 2020-01-06 | 7 | 14 | Tepat Waktu |
| 9 | 115/Pid.Sus/2019/PN Pps | 2019-12-23 | 2020-01-06 | 14 | 14 | Tepat Waktu |

Untuk Perkara Kasasi :

| No | Nama Perkara | Tanggal Menyatakan Kasasi | Tanggal Pengiriman Berkas ke MARI | Selisih Waktu | Tenggang Waktu Maksimal | Keterangan |
|----|---------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------|-------------------------|-------------|
| 1 | 5/Pid.B/2018/PN Pps | 2019-02-18 | 2019-03-15 | 25 | 30 | Tepat Waktu |

Pengiriman Berkas dianggap tepat dan lengkap jika tenggang waktu Pengiriman adalah 14 Hari sejak para pihak menyatakan Banding pada perkara Pidana dan 30 hari pada Perkara Perdata.

Untuk indikator Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi, dan PK secara lengkap dan tepat waktu ditetapkan target sebesar 95%. Perhitungan Indikator ini adalah sebagai berikut:

Untuk tahun 2018

$$\begin{aligned} & \text{Persentase Indikator} \\ &= \frac{\text{Jumlah Perkara yang dikirim tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara Banding, Kasasi dan PK}} \times 100\% \end{aligned}$$

$$\text{Persentase Indikator} = \frac{2}{2} \times 100\%$$

$$\text{Persentase Indikator} = 100 \%$$

Sehingga untuk indikator ini Realisasi adalah 100%, sedangkan target yang ingin dicapai pada Indikator ini adalah 95 % sehingga jika dipersentasekan, maka nilai Indikator ini adalah 294,12 % sebagaimana perhitungan di bawah ini:

$$\text{Nilai Indikator} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Nilai Indikator} = \frac{100 \%}{95 \%} \times 100\%$$

$$\text{Nilai Indikator} = 105,26 \%$$

Untuk tahun 2019

Persentase Indikator

$$= \frac{\text{Jumlah Perkara yang dikirim tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara Banding, Kasasi dan PK}} \times 100\%$$

$$\text{Persentase Indikator} = \frac{10}{10} \times 100\%$$

$$\text{Persentase Indikator} = 100 \%$$

Sehingga untuk indikator ini Realisasi adalah 100%, sedangkan target yang ingin dicapai pada Indikator ini adalah 95 % sehingga jika dipersentasekan, maka nilai Indikator ini adalah 294,12 % sebagaimana perhitungan di bawah ini:

$$\text{Nilai Indikator} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Nilai Indikator} = \frac{100 \ %}{95 \ %} \times 100\%$$

$$\text{Nilai Indikator} = 105,26 \ %$$

Sehingga tidak ada kenaikan dalam Indikator ini disebabkan karena semua Pengiriman Berkas Perkara sudah tepat waktu semuanya.

e. Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus

Selama tahun 2018 maupun 2019 tidak ada satupun perkara yang menarik perhatian masyarakat. Sehingga untuk indikator

3. Meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TAR-GET | REALI-SASI | PERSEN-TASE | TAR-GET | REALI-SASI | PERSEN-TASE |
|-----|---|---|------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|
| | | | Tahun 2018 | | | Tahun 2019 | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (4) | (5) | (6) |
| 3 | Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan | Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat | 5% | 0% | 0% | | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| | | Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) | | | | | | |
|--|--|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|

a. **Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)**

Posbakum (Pos bantuan Hukum) adalah salah satu program unggulan Mahkamah Agung untuk meningkatkan akses peradilan pada masyarakat. Pengadilan Negeri Pulang Pisau dalam pelaksanaan posbakum bekerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum PERADI pada tahun 2019 dalam indikator kinerja ini ditetapkan target 20% dan dalam realisasinya tidak ada satupun hasil Konsultasi yang menjadi perkara.

Sedangkan untuk tahun 2018, Pengadilan Negeri Pulang Pisau belum memiliki anggaran untuk POSBAKUM, karena DIPA nya masih di Pengadilan Negeri Induk yaitu Pengadilan Negeri Kuala Kapuas.

4. **Terwujudnya sistem manajemen informasi yang terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan, dan akuntabel**

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TAR-GET | REALI-SASI | PERSEN-TASE | TAR-GET | REALI-SASI | PERSEN-TASE |
|-----|--|--|------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|
| | | | Tahun 2018 | | | Tahun 2019 | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (4) | (5) | (6) |
| 4 | Meningkatnya kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan | Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) | 90% | 100% | 111,41% | 90% | 100% | 111,41% |

a. **Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)**

Untuk indikator persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) ditetapkan target 20% dan realisasinya mencapai 0%, dimana sepanjang tahun 2019 belum ada pihak yang mengajukan permohonan eksekusi di Pengadilan Negeri Pulang Pisau. Sedangkan Tahun 2018 juga belum ada Perkara Perdata yang masuk.

A.3. Perbandingan antara Realisasi Kinerja tahun 2019 dengan Target Jangka Menengah RENSTRA 2015-2019

Berdasarkan dokumen Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010- 2035 Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Rencana Jangka Panjang dan dokumen Rencana Strategis Mahkamah Agung RI tahun 2015 - 2019 sebagai Rencana Jangka Menengah maka Pengadilan Pulang Pisau juga telah menyusun Rencana Strategis PN Pulang Pisau 2015-2019 (Renstra) dengan melakukan reviu atas Misi, tujuan, dan sasaran strategis yang ingin dicapai. Oleh sebab itu maka indikator-indikator Kinerja yang ingin dicapai untuk mewujudkan sasaran strategis, tujuan, misi dan visi yang telah ditetapkan tersebut juga harus direviu agar selaras.

Dalam Renstra PN Pulang Pisau 2015-2019 telah dituangkan indikator-indikator baru yang disesuaikan dengan terget jangka menengah. Adapun pencapaian kinerja 2017 jika diukur menggunakan indikator dalam Renstra 2015-2019 yang memuat target jangka menengah dapat diuraikan sebagai berikut :

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET 2019 | REALISASI 2019 |
|-----|--|---|-------------|----------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel | Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan | 100% | 100% |
| | | Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan | 100% | 100% |
| | | Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu | 95% | 82,35% |
| | | Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu | 95% | 99,3% |
| | | Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding | 70% | 93,33 % |
| | | Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi | 80% | 98,11 % |
| | | Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali | 90% | 100% |

| | | | | |
|---|---|--|-----|--------|
| | | Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi | 2% | 0% |
| | | Index Kepuasan Pencari Keadilan | 70% | 77,99% |
| 2 | Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara | Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu | 95% | 70,59% |
| | | Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu | 95% | 94,37% |
| | | Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi | 2% | 5,88% |
| | | Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu | 95% | 100% |
| | | Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus | 90% | 100% |
| 3 | Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan | Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) | 5% | 0% |
| 4 | Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan | Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak Lanjuti (Dieksekusi) | 90% | 100% |

Dari pencapaian realisasi kinerja tahun 2019 dengan dibandingkan pada target kinerja di akhir Rencana Program jangka Menengah yang berakhir pada tahun 2019 nampak bahwa pencapaian Pengadilan Negeri Pulang Pisau cukup memuaskan, dan optimis pada tahun 2019 semua indikator kinerja yang ditetapkan akan dapat dilaksanakan dan memenuhi semua target yang telah ditetapkan.

A.4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Realisasi kinerja 2019

Pencapaian realisasi Kinerja Pengadilan Negeri Pulang Pisau pada tahun 2019 ini dapat dikatakan telah memberikan hasil yang optimal menyesuaikan dengan Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Dana yang ada di PN Pulang Pisau.

Dimana rata-rata setiap indikator kinerja yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dengan melampaui target.

Namun masih ada beberapa aspek yang belum dapat dilaksanakan secara maksimal untuk mencapai target Penetapan Kinerja di Pengadilan Negeri Pulang Pisau. Hal tersebut diantaranya adalah :

- Pengelolaan Tertib administrasi perkara yang tidak dapat dilakukan tepat waktu mengingat SDM yang ada sangat masih minim dari segi jumlah. Karena sangat kurangnya staf di bagian Kepaniteraan, sehingga output yang ingin dicapai kurang optimal. Hal ini tergambar pada beberapa indikator yang memiliki persentase kurang dari 100% seperti Indikator Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu, Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu, Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu.
- Keadaan lapangan tidak mendukung untuk memperoleh nilai yang maksimal. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi dan Indikator Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) tidak memperoleh hasil yang maksimal dikarenakan faktor eksternal misalkan para pihak atau perkara yang masuk tidak mendukung untuk memperoleh nilai indikator yang maksimal.

A.5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh suatu Organisasi tentunya menggunakan sumber daya baik berupa Sumber daya Dana maupun sumber daya Manusia.

Pada tahun 2019, Pengadilan Negeri Pulang Pisau mendapat anggaran belanja sebesar Rp 2.806.670.000,- (Dua Milyar Delapan Ratus Enam Ribu Enam ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) DIPA Badan Urusan Administrasi dan 63.700.000,- (Enam Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) DIPA Badan Peradilan Umum dengan tingkat penyerapan anggaran 99.33% untuk DIPA BUA dan 99.55% untuk DIPA Badan Peradilan Umum

Penyerapan anggaran ini sudah mencapai persentase relative baik, dan semua program yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dengan baik. Uraian lebih rinci mengenai efisiensi anggaran akan diuraikan pada bagian Realisasi Anggaran.

Efisiensi atas penggunaan SDM pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau juga sudah dilaksanakan sebaik mungkin, dengan tenaga yang sangat minimal.

Namun ditengah keterbatasan jumlah SDM tersebut Pengadilan Negeri Pulang Pisau tetap berkomitmen dan berusaha maksimal untuk menjalankan tugas dan kewajibannya dengan sebaik mungkin, serta terus meningkatkan kinerjanya.

A.6. Analisis atas program kerja/kegiatan yang mendukung keberhasilan /kegagalan pencapaian target kinerja 2019

Program kerja Pengadilan Negeri Pulang Pisau tahun 2019 telah disusun dengan mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999. Dalam program kerja tersebut sudah tertuang kegiatan- kegiatan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Pulang Pisau baik kegiatan utama/prioritas maupun kegiatan pendukung.

Keberhasilan dalam pelaksanaan program kerja yang utama adalah karena adanya komitmen dari setiap unsur yang terlibat di organisasi Pengadilan Negeri Pulang Pisau untuk melakukan reformasi birokrasi dan menyelenggarakan pelayanan prima.

Adapun untuk pencapaian pada tahun 2019 ini diperoleh dengan kerja keras semua SDM yang terlibat dan supervisi dari unsur pimpinan yang diwujudkan dengan diadakannya rapat bulanan, maupun briefing insidental bagi tenaga teknis fungsional maupun pejabat kesekretariatan. Selain itu adanya supervisi Pengadilan Tinggi yang kemudian ditindak lanjuti rekomendasinya oleh Pimpinan memberikan sumbangsih yang cukup besar dalam peningkatan kinerja, disamping dilakukannya Pengawasan dan Evaluasi oleh Pimpinan sesuai Petunjuk Bindalmin pada Buku II dan Buku IV.

Hasilnya adalah dalam audit akreditasi penjaminan mutu (Indonesia court performance-Excelent) yang dilakukan oleh tim audit TAPM PN Pulang Pisau menerima Sertifikat Akreditasi penjaminan mutu badan peradilan umum nomor : TAPM.021/QMR/SERTIFIKAT.I/09/2019 dengan nilai B.

Demikian juga dengan adanya pengawasan dari Hakim Pengawas Bidang yang laporannya diserahkan pada Ketua Pengadilan Negeri melalui Wakil Ketua Pengadilan Negeri seharusnya laporan tersebut dapat dijadikan *feedback* (umpan balik) dalam mengambil kebijakan untuk perbaikan kinerja masing-masing bagian. Namun saat ini LHP tersebut hanya bersifat memotret permukaan saja tanpa menggali masalah-

masalah yang sebenarnya ada untuk dianalisis sehingga menghasilkan kebijakan yang aplikatif dan mengarah pada perbaikan kinerja.

B. REALISASI ANGGARAN

Pada Tahun 2019 Pengadilan Negeri Pulang Pisau mendapat alokasi anggaran untuk mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan sebesar Rp 2.870.370.000,- (Dua Milliar Delapan ratus Tujuh Puluh Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) yang bersumber dari 2 unit organisasi yaitu :

DIPA 01 dari Badan Urusan Administrasi sebesar Rp. 2.806.670.000,- (Dua Milliar Delapan Ratus Enam Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Rib Rupiah) yang ditujukan untuk membiayai program :

- Program dukungan manajemen dan pelaksanaan Tugas teknis lainnya Mahkamah Agung
- Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

DIPA 03 dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum sebesar Rp. 63.700.000,- (Enam Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) yang ditujukan untuk membiayai program :

- Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Adapun Realisasi anggaran tahun 2019 pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau adalah sebagai berikut :

| No | Jenis Belanja | Anggaran | Realisasi | % Realisasi |
|----------------|----------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|
| DIPA 01 | | | | |
| 1 | Belanja Pegawai (51) | Rp 1.860.360.000,- | Rp 1.860.330.735,- | 100,00 % |
| 2 | Belanja Barang (52) | Rp 521.310.000,- | Rp 503.272.592,- | 96.54 % |
| 3 | Belanja Modal (53) | Rp 425.000.000,- | Rp 424.210.410,- | 99,81% |
| | JUMLAH I | Rp 2.806.670.000,- | Rp 2.787.811.078,- | 99,33% |
| DIPA 03 | | | | |
| 1 | Belanja Barang (52) | Rp 63.700.000,- | Rp 63.414.950,- | 99,55% |

| | | | | |
|--|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|
| | JUMLAH II | Rp 63.700.000,- | Rp 63.414.950,- | 99,55% |
| | JUMLAH TOTAL I + II | Rp 2.870.370.000,- | Rp 2.851.226.028,- | 99,33% |

Rekapitulasi Realisasi anggaran tahun 2019 adalah :

| | |
|-----------------------|----------------------|
| Anggaran | : Rp 2.870.370.000,- |
| Realisasi | : Rp 2.851.226.028,- |
| Sisa anggaran | : Rp 19.143.972,- |
| Persentase Pencapaian | : 99,33 % |

Adapun rincian realisasi anggaran di setiap program layanan adalah sebagai berikut :

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya (DIPA 01)

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Jumlah Anggaran | : Rp 2.381.670.000 ,- |
| Realisasi Anggaran | : Rp 2.363.603.327 ,- |
| Sisa Anggaran | : Rp 18.066.673 ,- |
| Persentase Realisasi Anggaran | : 100,00 % |

Dengan perincian :

Belanja Barang

| No. | Anggaran | Realisasi | Sisa | % Realisasi |
|-----|------------------|------------------|-----------------|-------------|
| 1 | Rp 521.310.000,- | Rp 503.272.592,- | Rp 18.037.408,- | 96.54 % |

Belanja Pegawai

| No. | Anggaran | Realisasi | Sisa | % Realisasi |
|-----|--------------------|--------------------|-------------|-------------|
| 1 | Rp 1.860.360.000,- | Rp 1.860.330.735,- | Rp 29.265,- | 100,00 % |

2. Program Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung (DIPA 01) :

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Jumlah Anggaran | : Rp 425.000.000,- |
| Realisasi Anggaran | : Rp 424.210.410,- |
| Sisa Anggaran | : Rp 789.590,- |
| Persentase Realisasi Anggaran | : 99,81% |

Dengan perincian :

Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Bermotor

(1 Unit Kendaraan Roda 4, 2 Unit Kendaraan Roda 2)

| No. | Anggaran | Realisasi | Sisa | % Realisasi |
|-----|-------------|-------------|---------|-------------|
| 1 | 300.000.000 | 299,224,010 | 775.990 | 99,74% |

Belanja Modal Pengadaan Laptop Hakim

| No. | Anggaran | Realisasi | Sisa | % Realisasi |
|-----|------------|------------|--------|-------------|
| 1 | 39.000.000 | 38.986.400 | 13.600 | 99,97% |

Belanja Modal Pengadaan Jaringan Internet

| No. | Anggaran | Realisasi | Sisa | % Realisasi |
|-----|------------|------------|------|----------------|
| 1 | 86.000.000 | 86.000.000 | 0 | 100% |

3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan (DIPA 03) :

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Jumlah Anggaran | : Rp 63.700.000 ,- |
| Realisasi Anggaran | : Rp 63.414.950 ,- |
| Sisa Anggaran | : Rp 285.050 ,- |
| Persentase Realisasi Anggaran | : 99,55 % |

Dengan perincian :

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

1. Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM)

| No. | Anggaran | Realisasi | Sisa | % Realisasi |
|-----|--------------------|-----------------|----------|----------------|
| 1 | Rp 24.000.000,- | Rp 24.000.000,- | Rp 0,00, | 100% |

2. Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan ditingkat pertama dan banding yang tepat waktu

| No. | Anggaran | Realisasi | Sisa | % Realisasi |
|-----|-----------------|-----------------|--------------|-------------|
| 1 | Rp 39.700.000,- | Rp 39.414.950,- | Rp 285.050,- | 99,28 % |



PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU KELAS II



BAB IV PENUTUP



Jalan Tingang Menteng No.39, Pulang
Pisau 748111, Kab. Pulang Pisau,
Kalimantan Tengah
Telp. (0513) 2027516



www.pn-pulangpisau.go.id
pnulangpisau@gmail.com



BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) PN Pulang Pisau tahun 2019 ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Dengan disusunnya Laporan ini dapat terlihat kinerja Pengadilan Negeri Pulang Pisau secara transparan dan akuntabel sehingga bisa menjadi patokan pencapaian target kinerja Pengadilan Negeri Pulang Pisau. Tentunya hal ini akan membawa dampak positif terhadap pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan di Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) PN Pulang Pisau tahun 2019 diramu dalam pencapaian kinerja pada 7 (tujuh) sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Reviu ke-3 Renstra Pengadilan Negeri Pulang Pisau 2015-2019 sebelumnya. Namun selain itu untuk membandingkan hasil realisasi kinerja pada tahun 2019 dengan tahun 2016 masih digunakan indikator kinerja dari 7 (tujuh) sasaran strategis pada Reviu Renstra 2015-2019 sebelumnya

Pada umumnya secara keseluruhan pencapaian kinerja PN Pulang Pisau pada tahun 2019 telah menunjukkan kinerja yang baik ditengah keterbatasan-keterbatasan yang ada. Hampir semua sasaran strategis yang ditetapkan telah dilaksanakan dengan baik, dan pada Indikator pencapaian 0% adalah karena tidak adanya data yang terekam (tidak ada perkara prodeo dan *zitting plaats* yang terdaftar pada PN Pulang Pisau).

Hasil Pencapaian Kinerja yang telah diuraikan diatas baik keberhasilan maupun kegagalannya harus membuat PN Pulang Pisau lebih meningkatkan performanya dalam langkah mewujudkan visi **“Terwujudnya Pengadilan Negeri Pulang Pisau Yang Agung”**

B. SARAN

Berdasarkan hasil-hasil pencapaian dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada satuan kerja Pengadilan Negeri Pulang Pisau ini didapat beberapa saran yang ingin disampaikan yaitu :

1. Diperlukannya peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagai sarana kontrol yang objektif dan transparan dalam mengelola sarana dan prasarana serta keterampilan sumber daya manusia untuk peningkatan kinerja suatu organisasi ;
2. LKjIP sebagai hasil akhir dari Implementasi SAKIP kiranya dapat dioptimalkan sebagai alat evaluasi kinerja bagi instansi yang bersangkutan ;
3. Diperlukan Keterbukaan didalam memberikan data untuk penyusunan LKjIP ini agar Kinerja yang diukur dapat menggambarkan keadaan yang sebenarnya sehingga dapat menjadi feedback untuk menghasilkan suatu kebijakan yang mengarah pada perbaikan kinerja ;
4. Perlunya evaluasi atas LKjIP yang telah disusun dan agar disosialisasikan kepada segenap aparatur peradilan terkait agar LKjIP ini dapat bermanfaat secara optimal untuk terwujudnya pelayanan prima di Pengadilan Negeri Pulang Pisau ;
5. Diperlukan feedback dari Pengadilan Tinggi sebagai bagian dari Supervisi terhadap LKjIP yang telah disusun agar LKjIP ini dapat menjadi Pedoman dalam peningkatan kinerja organisasi itu sendiri.



Lampiran
**INDIKATOR
KINERJA UTAMA**



**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU
NOMOR : W16-U11/04/KPN/SK/II/2019**

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU KELAS II**

KETUA PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a, maka dipandang perlu untuk menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Pulang Pisau;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
5. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009.

8. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja
9. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung.
10. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.
11. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja.
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
11. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU KELAS II**
- Pertama : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Pulang Pisau untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Pengadilan Negeri Pulang Pisau 2015 - 2019.
- Kedua : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan setiap tahun dan disampaikan kepada Pengadilan Tinggi Palangka Raya, Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.

- Ketiga : Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan keputusan ini, Hakim Pengawas Bidang diberikan tugas untuk :
- a. Melakukan reviu atas capaian kinerja setiap sub bagian dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja ;
 - b. Melakukan evaluasi terhadap keputusan ini dan melaporkan kepada Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pulang Pisau.

Pada Tanggal : 02 Januari 2019



KETUA PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU,

AGUNG NUGROHO, S.H.

MP. 19720307 200003 1 003

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya di Palangka Raya.
2. Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Negeri Pulang Pisau

PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU KELAS II
DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU

NOMOR : W16-U11/04/KPN/SK/II/2019
TANGGAL : 02 JANUARI 2019

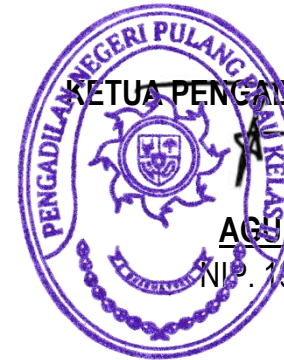
INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU KELAS II

| No. | Kinerja Utama | Indikator Kinerja Utama | Penjelasan | Penanggung Jawab | Sumber Data |
|-----|---|--|--|------------------|-------------------------------------|
| 1. | Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel | Persentase Sisa Perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana | $\frac{\text{Jumlah sisa perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : Sisa perkara : sisa perkara tahun sebelumnya | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| | | Persentase perkara : - Perdata - Pidana Yang diselesaikan tepat waktu | $\frac{\text{Jumlah sisa perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah perkara yang ada}} \times 100\%$ Catatan : * Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal dan tahun dan perkara yang masuk) * Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya * Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| | | Persentase Penurunan Sisa Perkara : - Perdata - Pidana | $\frac{Tn.1 - Tn}{Tn.1} \times 100\%$ Tn = Sisa perkara tahun berjalan Tn.1 = Sisa perkara tahun sebelumnya Catatan : Sisa perkara adalah perkara yang belum diputus pada tahun berjalan | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |

| No. | Kinerja Utama | Indikator Kinerja Utama | Penjelasan | Penanggung Jawab | Sumber Data |
|-----|--|---|---|------------------|-------------------------------------|
| | | Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : <ul style="list-style-type: none"> - Banding - Kasasi - PK | $\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum}}{\text{Jumlah putusan perkara}} \times 100\%$ <p>Catatan : * Upaya hukum = banding, kasasi, PK * Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan</p> | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| | | Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan melalui Diversi | $\frac{\text{Jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan secara Diversi}}{\text{Jumlah perkara pidana anak}} \times 100\%$ <p>Catatan : Diversi : anak pelaku kejahatan tidak dianggap sebagai pelaku kejahatan, melainkan sebagai korban</p> | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| | | Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Indeks kepuasan pencari keadilan</div> <p>Catatan : PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang pedoman umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik</p> | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| 2. | Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara | Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu | $\frac{\text{Jumlah isi Putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{Jumlah putusan}} \times 100\%$ | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| | | Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi | $\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan melalui Mediasi}}{\text{Jumlah perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$ <p>Catatan : Perma No. 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan</p> | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |

| No. | Kinerja Utama | Indikator Kinerja Utama | Penjelasan | Penanggung Jawab | Sumber Data |
|-----|---|--|--|------------------|-------------------------------------|
| | | Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu | $\frac{\text{Jumlah berkas perkara yang diajukan banding kasasi dan PK secara lengkap}}{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding kasasi dan PK}} \times 100\%$ | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| | | Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus | $\frac{\text{Jumlah putusan perkara one day publish yang diupload dalam website}}{\text{Jumlah perkara yang menarik perhatian publik yang diputus}} \times 100\%$ | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| 3. | Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan | Persentase perkara prodeo yang diselesaikan | $\frac{\text{Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara prodeo}} \times 100\%$ Catatan : Perma No. 1 tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| | | Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan | $\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan diluar Gedung Pengadilan}} \times 100\%$ Catatan : * Perma No. 1 tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan * Diluar Gedung Pengadilan adalah perkara yang diselesaikan diluar kantor pengadilan (<i>zetting plaats</i> , sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya) | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| | | Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) | $\frac{\text{Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum}}{\text{Jumlah pencari keadilan golongan tertentu}} \times 100\%$ Catatan : | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |

| No. | Kinerja Utama | Indikator Kinerja Utama | Penjelasan | Penanggung Jawab | Sumber Data |
|-----|--|--|---|------------------|-------------------------------------|
| | | | <p>* Perma No. 1 tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan</p> <p>* Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal)</p> | | |
| 4. | Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan | Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (Dieksekusi) | $\frac{\text{Jumlah putusan perkara yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah putusan perkara yang sudah BHT}} \times 100\%$ <p>Catatan : BHT : Berkekuatan Hukum Tetap</p> | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |



KETUA PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU,

AGUNG NUGROHO, S.H.

NIP. 19720307 200003 1 003



Lampiran

**REVIU INDIKATOR
KINERJA UTAMA
TAHUN 2019**



SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU
NOMOR : W16-U11/60/KPN/OT.01/SK/08/2019

TENTANG

PENETAPAN REVIU KE-1 INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU KELAS II

KETUA PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU

- Menimbang :
- a. Bahwa, untuk tertib administrasi dalam pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2019 perlu ditetapkan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Pulang Pisau;
 - b. Bahwa Berdasarkan Evaluasi Penyelenggaraan Program Kerja terkait Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Berbasis Teknologi Informasi (TI) tanggal 26 sd 27 Agustus 2019 terdapat Perubahan pada Indikator Kinerja Mahkamah Agung;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan b, maka dipandang perlu untuk menetapkan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Pulang Pisau Kelas II Tahun 2019;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
 2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 3. Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;
 4. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

5. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009.
8. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja
9. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung.
10. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.
11. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja.
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
11. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU
TENTANG PENETAPAN REVIU KE-1 INDIKATOR KINERJA

UTAMA PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU KELAS II
TAHUN 2019

- Pertama : Menyatakan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) ke-1 Pengadilan Negeri Pulang Pisau sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai acuan indikator kinerja utama dan digunakan dalam menyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pengadilan Negeri Pulang Pisau.
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Pulang Pisau.
Pada Tanggal : 26 Agustus 2019

KETUA PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU,

AGUNG NUGROHO

PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU KELAS II
 DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU

NOMOR : W16-U11/60/KPN/OT.01/SK/08/2019
 TANGGAL : 26 Agustus 2019

REVIU KE-1 INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU KELAS II

| No. | Kinerja Utama | Indikator Kinerja Utama | Penjelasan | Penanggung Jawab | Sumber data |
|-----|---|--|---|------------------|---|
| 1. | Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel | Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan | $\frac{\text{Jumlah sisa perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan : Sisa perkara : sisa perkara tahun sebelumnya</p> | Panitera | Laporan Bulanan, Triwulanan dan Tahunan |
| | | Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan | $\frac{\text{Jumlah sisa perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan : Sisa perkara : sisa perkara tahun sebelumnya</p> | Panitera | Laporan Bulanan, Triwulanan dan Tahunan |
| | | Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu | $\frac{\text{Jumlah sisa perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah perkara yang ada}} \times 100\%$ <p>Catatan : * Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal dan tahun dan perkara yang masuk)</p> | Panitera | Laporan Bulanan, Triwulanan dan Tahunan |

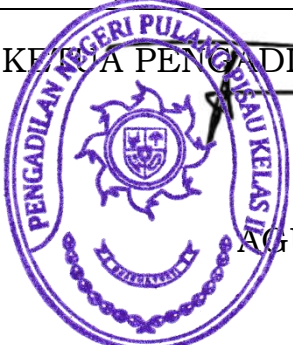
| No. | Kinerja Utama | Indikator Kinerja Utama | Penjelasan | Penanggung Jawab | Sumber data |
|-----|---------------|--|--|------------------|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> * Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya * Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan | | |
| | | Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu | $\frac{\text{Jumlah sisa perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah perkara yang ada}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> * Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal dan tahun dan perkara yang masuk) * Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya * Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan | Panitera | Laporan Bulanan, Triwulanan dan Tahunan |
| | | Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding | $\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum}}{\text{Jumlah putusan perkara}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> * Upaya hukum = banding * Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan | Panitera | Laporan Bulanan, Triwulanan dan Tahunan |
| | | Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi | $\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum}}{\text{Jumlah putusan perkara}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> * Upaya hukum = kasasi | Panitera | Laporan Bulanan, Triwulanan dan Tahunan |

| No. | Kinerja Utama | Indikator Kinerja Utama | Penjelasan | Penanggung Jawab | Sumber data |
|-----|-------------------------------------|---|--|------------------|---|
| | | | * Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan | | |
| | | Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali | $\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum}}{\text{Jumlah putusan perkara}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> * Upaya hukum = PK * Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan | Panitera | Laporan Bulanan, Triwulanan dan Tahunan |
| | | Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan melalui Diversi | $\frac{\text{Jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan secara Diversi}}{\text{Jumlah perkara pidana anak}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <p>Diversi : anak pelaku kejahatan tidak dianggap sebagai pelaku kejahatan, melainkan sebagai korban</p> | Panitera | Laporan Bulanan, Triwulanan dan Tahunan |
| | | Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Indeks kepuasan pencari keadilan</div> <p>Catatan :</p> <p>PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang pedoman umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik</p> | Panitera | Laporan Bulanan, Triwulanan dan Tahunan |
| 2. | Peningkatan Efektifitas Pengelolaan | Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim | $\frac{\text{Jumlah isi Putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{Jumlah putusan}} \times 100\%$ | Panitera | Laporan Bulanan, Triwulanan dan Tahunan |

| No. | Kinerja Utama | Indikator Kinerja Utama | Penjelasan | Penanggung Jawab | Sumber data |
|-----|----------------------|--|--|------------------|---|
| | Penyelesaian Perkara | kepada Para Pihak tepat waktu | | | |
| | | Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu | $\frac{\text{Jumlah isi Putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{Jumlah putusan}} \times 100\%$ | Panitera | Laporan Bulanan, Triwulanan dan Tahunan |
| | | Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi | $\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan melalui Mediasi}}{\text{Jumlah perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$ Catatan : Perma No. 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan | Panitera | Laporan Bulanan, Triwulanan dan Tahunan |
| | | Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu | $\frac{\text{Jumlah berkas perkara yang diajukan banding kasasi dan PK secara lengkap}}{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding kasasi dan PK}} \times 100\%$ | Panitera | Laporan Bulanan, Triwulanan dan Tahunan |
| | | Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus | $\frac{\text{Jumlah putusan perkara one day publish yang diupload dalam website}}{\text{Jumlah perkara yang menarik perhatian publik yang diputus}} \times 100\%$ | Panitera | Laporan Bulanan, Triwulanan dan Tahunan |
| No. | Kinerja Utama | Indikator Kinerja Utama | Penjelasan | Penanggung Jawab | Sumber data |

| | | | | | |
|----|---|--|--|----------|---|
| 3. | Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan | Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) | $\frac{\text{Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum}}{\text{Jumlah pencari keadilan golongan tertentu}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> * Perma No. 1 tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan * Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal) | Panitera | Laporan Bulanan, Triwulanan dan Tahunan |
| 4. | Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan | Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (Dieksekusi) | $\frac{\text{Jumlah putusan perkara yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah putusan perkara yang sudah BHT}} \times 100\%$ <p>Catatan : BHT : Berkekuatan Hukum Tetap</p> | Panitera | Laporan Bulanan, Triwulanan dan Tahunan |

KEJAKSAAN PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU,



AGUNG NUGROHO



Lampiran

REVISI

PENETAPAN KINERJA

TAHUN 2019

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU**



REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama : AGUNG NUGROHO, S.H.
Jabatan : KETUA PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU KELAS II

Selanjutnya di sebut **Pihak Pertama.**

Nama : H. MOCHAMAD HATTA, S.H., M.H
Jabatan : KETUA PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua.**

Pihak Pertama pada tahun 2019 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperkuan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pulang Pisau, 30 Agustus 2019

Pihak Kedua



H. MOCHAMAD HATTA, S.H., M.H
NIP. 19590511 198403 1 004

Pihak Pertama



AGUNG NUGROHO, S.H.
NIP. 19720307 200003 1 003

LAMPIRAN REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Pengadilan Negeri Pulang Pisau

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|-----|---|--|--------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel | Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan | 100 % |
| | | Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan | 100 % |
| | | Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu | 95 % |
| | | Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu | 95 % |
| | | Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding | 70 % |
| | | Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi | 80 % |
| | | Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali | 90 % |
| | | Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi | 2 % |
| | | Index Kepuasan Pencari Keadilan | 70 % |
| 2 | Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara | Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu | 95 % |
| | | Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu | 95 % |
| | | Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi | 2 % |
| | | Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu | 95 % |
| | | Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus | 90 % |
| 3 | Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan | Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) | 5 % |
| 4 | Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan | Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi) | 90% |

| No | Kegiatan | Anggaran | |
|----|---|----------|---------------|
| 1. | Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi | Rp. | 2.381.670.000 |
| 2. | Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung | Rp. | 425.000.000 |
| 3. | Peningkatan Manajemen Peradilan Umum | Rp. | 63.700.000 |
| | | | |

Pulang Pisau, 30 Agustus 2019

Pihak Kedua




H. MOCHAMAD HATTA, S.H., M.H
NIP. 19590511 198403 1 004

Pihak Pertama




AGUNG NUGROHO, S.H.
NIP. 19720307 200003 1 003



Lampiran
**RENCANA KINERJA
TAHUNAN
TAHUN 2019**



REVISI RENCANA KINERJA TAHUNAN

Unit Organisasi : PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU
 Tahun Anggaran : 2019

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|-----|--|--|--------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel | Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan | 100 % |
| | | Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan | 100 % |
| | | Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu | 95 % |
| | | Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu | 95 % |
| | | Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding | 70 % |
| | | Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi | 80 % |
| | | Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali | 90 % |
| | | Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi | 2 % |
| | | Index Kepuasan Pencari Keadilan | 70 % |
| 2 | Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara | Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu | 95 % |
| | | Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu | 95 % |
| | | Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi | 2 % |
| | | Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu | 95 % |
| | | Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus | 90 % |

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|-----|---|--|--------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 3 | Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan | Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) | 5 % |
| 4 | Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan | Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi) | 90% |

Ditetapkan di : Pulang Pisau
 Pada Tanggal : 30 Agustus 2019

Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau,



AGUNG NUGROHO, S.H.
 NIP. 19720307 200003 1 003



Lampiran
**SURAT
KEPUTUSAN**



PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU KELAS II

KEPUTUSAN

KETUA PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU

NOMOR : W16-U11/98/KPN/OT.01/SK/12/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU TAHUN 2019

KETUA PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU,

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka untuk memberikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di lingkungan Pengadilan Negeri Pulang Pisau tahun 2019 yang akurat, lengkap, mudah dicerna dan tepat sasaran maka dipandang perlu membentuk Tim Reviu Indikator Kinerja Utama pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau;
2. Bahwa dalam rangka untuk meninjau kembali atau mereviu Indikator Kinerja Utama (IKU), maka dipandang perlu membentuk Tim untuk melakukan Reviu IKU;
3. Bahwa untuk keperluan di atas perlu diatur dengan diterbitkan surat keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor: 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor: 9, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor: 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-undang Nomor: 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor: 2

Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor: 158, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor: 158, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 5077);

3. Peraturan Pemerintah Nomor: 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);
4. Instruksi Presiden Nomor: 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU TENTANG PEMBENTUKAN TIM REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU TAHUN 2019
- PERTAMA : Membentuk Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Pulang Pisau Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Daftar Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana tersebut dalam diktum pertama bertugas mereviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Pulang Pisau Tahun 2019, dan dalam

menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku efektif pada tanggal 01 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

KEEMPAT : **Salinan** Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pulang Pisau

Pada tanggal : 30 Desember 2018

KETUA PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU,



AGUNG NUGROHO

DAFTAR LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU

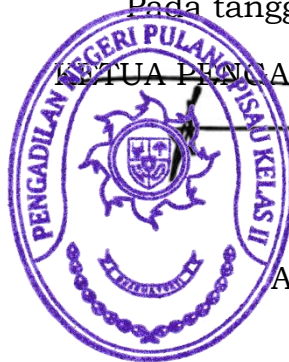
NOMOR : W16-U11/98/KPN/OT.01/SK/12/2018
TANGGAL : 30 Desember 2018

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU TAHUN 2019

| No. | Nama dan NIP | Jabatan Kedinasan | Kedudukan dalam Tim Penyusun |
|-----|--|--|------------------------------|
| 1 | AGUNG NUGROHO, SH NIP. 19720307 200003 1 003 | Ketua | Penanggung Jawab |
| 2 | NENNY EKAWATY BARUS, S.H.,M.H NIP. 19770112 200112 2 001 | Wakil Ketua | Pengarah Pelaksana |
| 3 | M. YUNAN, S.H. NIP. 19620201 198503 1 006 | Panitera | Ketua Pelaksana I |
| 4 | I MADE LANDEP, SH NIP. 19721004 199303 1 006 | Sekretaris | Ketua Pelaksana II |
| 5 | SAMSUL RIZAL, S.H. NIP. 19840404 200604 1 004 | Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan | Sekretaris |
| 6 | LELO HERAWAN, S.H. NIP. 19850114 200904 1 003 | Panitera Muda Hukum | Anggota |
| 7 | MUHAMMAD RUSGIANSYAH, S.Hut., S.H. NIP. 19720924 200604 1 014 | Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan | Anggota |

Ditetapkan di : Pulang Pisau
Pada tanggal : 30 Desember 2018

KETUA PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU,



AGUNG NUGROHO



PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU KELAS II

JL. Tingang Menteng No 39 Telp. (0513) 2027516 , Fax (0513)2027516
Website : www.pn-pulangpisau.go.id. E-mail : pnpulangpisau@gmail.com

Pulang Pisau, 03 Januari 2020

Nomor : W16-U11/03/RPT/1/2020
Perihal : Penyusunan SAKIP
Lampiran : -

Kepada Yth : Tim Penyusun LjKIP
PN Pulang Pisau Tahun 2019
Di –
Tempat

Bersama ini dengan Hormat, kami mohon kehadirannya untuk dapat mengikuti Rapat Pada :

Hari : Senin
Tanggal : 06 Januari 2020
Waktu : 08.30 WIB – Selesai
Agenda : Rapat Penyusunan SAKIP
Tempat : Ruang Rapat

Demikian undangan ini dibuat, atas kehadiran dan perhatiannya diucapkan terima kasih.



KETUA PELAKSANA I
TIM PENYUSUNAN SAKIP,

M. YUNAN, S.H.

NIP. 19620201 198503 1 006


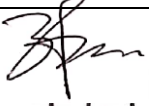
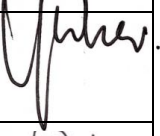



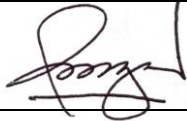
DOKUMENTASI RAPAT

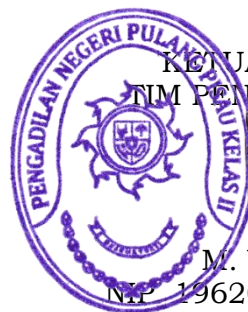
Agenda : Rapat Penyusunan SAKIP
Hari : Senin
Tanggal : 06 Januari 2020



DAFTAR HADIR

Agenda : Rapat Penyusunan SAKIP
Hari : Senin
Tanggal : 06 Januari 2020

| No. | Nama dan NIP | Kedudukan dalam Tim Penyusun | Tanda Tangan |
|-----|--|------------------------------|---|
| 1 | AGUNG NUGROHO, SH NIP. 19720307 200003 1 003 | Penanggung Jawab |  |
| 2 | NENNY EKAWATY BARUS, S.H.,M.H NIP. 19770112 200112 2 001 | Pengarah Pelaksana |  |
| 3 | M. YUNAN, S.H. NIP. 19620201 198503 1 006 | Ketua Pelaksana I |  |
| 4 | I MADE LANDEP, SH NIP. 19721004 199303 1 006 | Ketua Pelaksana II |  |
| 5 | SAMSUL RIZAL, S.H. NIP. 19840404 200604 1 004 | Sekretaris |  |
| 6 | LELO HERAWAN, S.H. NIP. 19850114 200904 1 003 | Anggota |  |
| 7 | MUHAMMAD RUSGIANSYAH, S.Hut., S.H. NIP. 19720924 200604 1 014 | Anggota |  |



KETUA PELAKSANA I
TIM PENYUSUNAN SAKIP,

M. YUNAN, S.H.
NIP. 19620201 198503 1 006

NOTULEN
Rapat Penyusunan SAKIP

I. PELAKSANAAN

- Tempat : Ruang Rapat Pengadilan Negeri Pulang Pisau
- Hari / Tanggal : 06 Januari 2020
- Waktu : 08.30 WIB – Selesai
- Agenda : Rapat Penyusunan SAKIP Tahun 2019

II. PIMPINAN RAPAT : Ketua Pelaksana I Penyusunan SAKIP

III. SUSUNAN ACARA :

- Pembukaan
- Pembahasan
- Penutup

IV. PESERTA RAPAT

Peserta Rapat ialah Tim Penyusunan LkJiP dan SAKIP tahun 2019

V. JALANNYA RAPAT

1. Pembukaan
2. Pembahasan Rapat
 - Realisasi Target Indikator:

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI |
|-----|--|--|--------|-----------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel | Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan | 100% | 100% |
| | | Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan | 100% | 100% |
| | | Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu | 95% | 82,35% |
| | | Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu | 95% | 99,3% |
| | | Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding | 70% | 93,33 % |
| | | Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi | 80% | 98,11 % |

| | | | | |
|---|---|--|-----|--------|
| | | Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali | 90% | 100% |
| | | Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi | 2% | 0% |
| | | Index Kepuasan Pencari Keadilan | 70% | 77,99% |
| 2 | Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara | Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu | 95% | 70,59% |
| | | Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu | 95% | 94,37% |
| | | Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi | 2% | 5,88% |
| | | Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu | 95% | 100% |
| | | Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus | 90% | 100% |
| 3 | Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan | Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) | 5% | 0% |
| 4 | Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan | Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi) | 90% | 100% |

- Terdapat perubahan indikator kinerja pada SAKIP sehingga dibuat reviu untuk perubahan tersebut. Perubahan target indikator kinerja pada tahun 2020 antara lain:
 1. Hasil Monev dari TIM Mahkamah Agung RI di Pengadilan Tinggi Palangka Raya SAKIP menghilangkan dan menyesuaikan beberapa Indikator

2. Target indikator kinerja "Persentase Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi" pada tahun 2019 realisasinya hanya 0% karena tidak ada perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi.
 3. Pada tahun 2019 tidak terdapat anggaran sidang keliling (zetting plaats) sehingga indikator kinerja "Persentase Perkara Yang Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan" tidak dimasukkan kembali ke dalam Target Reviu ke-1 Indikator Kinerja Utama
 4. Pembahasan Rapat
3. Penutup
- Rapat Ditutup pada Pukul 10.30 WIB

Pimpinan Rapat



M. Yunan

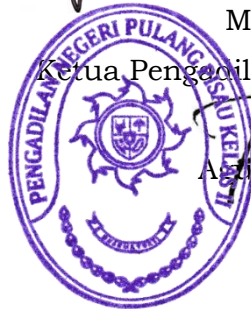
Notulen



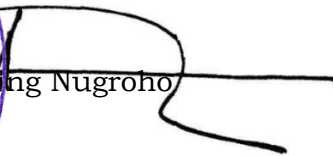
Samsul Rizal

Mengetahui

Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau



Agung Nugroho





PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU KELAS II

KEPUTUSAN

KETUA PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU
NOMOR : W16-U11/59/KPN/OT.01/SK/12/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH TAHUN 2019 DAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU TAHUN 2020

KETUA PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU,

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka untuk memberikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di lingkungan Pengadilan Negeri Pulang Pisau tahun 2019 yang akurat, lengkap, mudah dicerna dan tepat sasaran maka dipandang perlu membentuk Tim Penyusun LKjIP;
2. Bahwa menindaklanjuti surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 1604/SEK/OT.01.2/11/2019 tanggal 15 November 2019 perihal Penyampaian Dokumen SAKIP;
3. Bahwa dalam rangka untuk meninjau kembali atau mereviu Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Strategis (Renstra) dan Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), maka dipandang perlu membentuk Tim untuk melakukan Reviu IKU dan menyusun LKjIP;
4. Bahwa untuk keperluan di atas perlu diatur dengan diterbitkan surat keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor: 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor: 9, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4359) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor: 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

2. Undang-undang Nomor: 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor: 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor: 158, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor: 158, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 5077);
3. Peraturan Pemerintah Nomor: 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);
4. Instruksi Presiden Nomor: 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2019 DAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU TAHUN 2020

- PERTAMA : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 dan Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Pulang Pisau Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Daftar Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana tersebut dalam diktum pertama bertugas melakukan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 dan Reviu terhadap Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Pulang Pisau Tahun 2020, dan dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.
- KEEMPAT : **Salinan** Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pulang Pisau

Pada tanggal : 23 Desember 2019

KETUA PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU,



AGUNG NUGROHO

DAFTAR LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU

NOMOR : W16-U11/59/KPN/OT.01/SK/12/2019

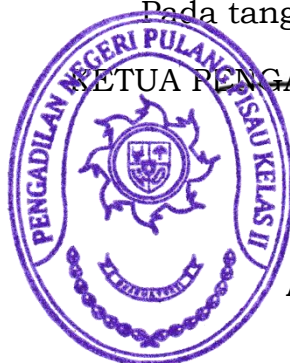
TANGGAL : 23 DESEMBER 2019

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH TAHUN 2019 DAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU TAHUN 2020

| No. | Nama dan NIP | Jabatan Kedinasan | Kedudukan dalam Tim Penyusun |
|-----|--|---|------------------------------|
| 1 | AGUNG NUGROHO, SH NIP. 19720307 200003 1 003 | Ketua | Penanggung Jawab |
| 2 | NENNY EKAWATY BARUS, S.H.,M.H NIP. 19770112 200112 2 001 | Wakil Ketua | Pengarah Pelaksana |
| 3 | M. YUNAN, S.H. NIP. 19620201 198503 1 006 | Panitera | Ketua Pelaksana I |
| 4 | I MADE LANDEP, SH NIP. 19721004 199303 1 006 | Sekretaris | Ketua Pelaksana II |
| 5 | SAMSUL RIZAL, S.H. NIP. 19840404 200604 1 004 | Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan | Sekretaris |
| 6 | LELO HERAWAN, S.H. NIP. 19850114 200904 1 003 | Panitera Muda Hukum | Anggota |
| 7 | MUHAMMAD RUSGIANSYAH, S.Hut., S.H. NIP. 19720924 200604 1 014 | Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan | Anggota |

Ditetapkan di : Pulang Pisau

Pada tanggal : 23 Desember 2019



KETUA PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU,

AGUNG NUGROHO



Lampiran
**REALISASI
ANGGARAN**